

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu amanat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2023 disusun mengacu pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersebar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan gambaran atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan pada TA 2023. Namun demikian, bentuk dan isi laporan kinerja OPD disusun tersendiri sebagaimana amanat peraturan perundangan yang berlaku. Kinerja yang dimaksud adalah kinerja keuangan yang secara umum dituangkan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun laporan keuangan yang berupa Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2023 yang akuntabel dan transparan.
- 2) Memenuhi kebutuhan informasi yang diperuntukkan bagi masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama TA 2023.

b. Tujuan Penyusunan LKPD

- 1) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (*stakeholders*) dalam menilai pertanggungjawaban (*accountability*) yang meliputi LRA, LO, Neraca, LPE, LPSAL, LAK, dan CaLK.
- 2) Penyajian informasi dalam LKPD dapat digunakan oleh pengguna informasi



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:

- a) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b) Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d) Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- e) Posisi keuangan dan kondisi pemerintah kabupaten berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f) Perubahan posisi keuangan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama TA 2023.

1.3 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);
- l. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 1); dan
- m. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 2).

1.4 Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah suatu format laporan yang menyajikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan. Dalam hal ini adalah LRA periode yang berakhir 31 Desember 2023.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah, untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang disajikan dalam laporan LO adalah pendapatan-LO, beban, transfer-LO, dan akun-akun luar biasa (transaksi yang bukan kegiatan operasional biasa). LO per 31 Desember 2023 disajikan secara komparatif dengan LO tahun lalu.

c. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu dalam periode pelaporan. Dalam hal ini adalah neraca per 31 Desember 2023 disajikan secara komparatif dengan neraca tahun lalu.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE per 31 Desember 2023 disajikan secara komparatif dengan LPE tahun lalu.

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL memuat saldo anggaran lebih/silpa awal, yaitu silpa tahun lalu, penggunaan saldo anggaran lebih/silpa tahun lalu, silpa/sikpa periode tahun pelaporan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun lalu (jika ada) yang akan menghasilkan saldo anggaran lebih akhir tahun periode pelaporan. LPSAL per 31 Desember 2023 disajikan secara komparatif dengan LPSAL tahun lalu.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan dan aktivitas transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. LAK per 31 Desember 2023 disajikan secara komparatif dengan LAK tahun lalu.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, Neraca, LPE, LPSAL, dan LAK. Selain itu juga dalam CaLK terdapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang harus diungkapkan dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.5 Sistematika Penulisan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Perkembangan Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Faktor pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

- 4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Anggaran
- 4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 5.1 Pendahuluan
- 5.2 Entitas
- 5.3 Basis Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 6.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 6.2 Penjelasan Laporan Operasional
- 6.3 Penjelasan Pos-Pos pada Neraca
- 6.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 6.5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 6.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

BAB VII INFORMASI NON KEUANGAN

- 7.1 Struktur Kepegawaian/Sumber Daya Manusia
- 7.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 7.3 Kelahiran
- 7.4 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD
- 7.5 Bencana Non Alam
- 7.6 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

BAB VIII PENUTUP



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

BAB II
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Perkembangan Ekonomi Makro

Kabupaten Way Kanan merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara yang secara resmi terbentuk pada tanggal 20 April 1999. Pemekaran tersebut didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Secara geografis Kabupaten Way Kanan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera bagian Selatan. Wilayah Kabupaten Way Kanan terletak di sebelah selatan Provinsi Sumatera Selatan pada 104,17°-105,04° bujur timur dan 4,12°- 4,58° lintang selatan. Adapun perbatasan Kabupaten Way Kanan meliputi sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah selatan dengan Kabupaten Lampung Utara, sebelah timur dengan Kabupaten Tulang Bawang, dan sebelah barat dengan Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Way Kanan terdiri dari 15 Kecamatan, yaitu: Banjit, Baradatu, Gunung Labuhan, Kasui, Rebang Tangkas, Blambangan Umpu, Way Tuba, Negeri Agung, Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Pakuan Ratu, Negara Batin, Negeri Besar, dan Umpu Semenguk. Luas kabupaten ini sebesar 392.163 hektare dan menjadi kabupaten terluas keempat dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan Ibukota Kabupaten adalah Blambangan Umpu yang menjadi salah satu kampung tua yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
Banjit	Pasar Banjit	331,60
Baradatu	Tiuh Balak Pasar	152,03
Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	115,22
Kasui	Jaya Tinggi	150,27
Rebang Tangkas	Gunung Sari	207,18
Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	357,09
Way Tuba	Way Tuba	206,25
Negeri Agung	Negeri Agung	562,98
Umpu Semenguk	Negeri Baru	334,62
Bahuga Mesir	Mesir Ilir	138,22
Buay Bahuga	Bumi Harjo	102,04
Bumi Agung	Bumi Agung	131,75
Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	580,34
Negara Batin	Negara Batin	348,40
Negeri Besar	Negeri Besar	362,37
Way Kanan	Blambangan Umpu	9.921,63

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan

Secara topografi, Kabupaten Way Kanan dapat dibagi menjadi 2 (dua) unit topografis yaitu daerah topografis berbukit sampai bergunung dan daerah River Basin.

Sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Way Kanan memiliki iklim tropis dengan 2 (dua) musim yang selalu berganti sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Suhu udara tertinggi sepanjang tahun 2022 tercatat pada bulan April, sebesar 33,30 derajat celsius dan terendah pada bulan Juni dan Agustus, sebesar 23,00 derajat celsius. Adapun secara rata-rata, suhu udara tertinggi pada tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

tercatat pada bulan April dengan 27,50 derajat celsius dan terendah pada bulan Juni dengan 26,20 derajat celsius. Curah hujan tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada bulan Oktober dengan 523,50 mm³. Kabupaten Way Kanan memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan di sektor pertanian. Sebagian besar sungai-sungainya mengalir dari arah barat yang berbukitbukit menuju ke arah Timur yang landai, hal ini sangat potensial untuk pengembangan irigasi. Secara topografis, Daerah Bumi Ramik Ragon merupakan daerah topografis berbukit hingga bergunung, dengan memiliki 3 buah gunung dan 6 buah sungai. Gunung tertinggi yaitu Gunung Pungur dengan ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut, sedangkan sungai terpanjang adalah sungai Way Besay yaitu mencapai 113 Km. Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki iklim tropis dengan dua musim yang selalu berganti sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Temperatur rata-rata di daerah ini pada 30°C. Kabupaten Way Kanan memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan di sektor pertanian. Sebagian besar sungai-sungainya mengalir dari arah barat yang berbukit-bukit menuju ke arah Timur yang landai, hal ini sangat potensial untuk pengembangan irigasi.

Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama ini secara nyata berhasil membawa perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari adanya perkembangan ekonomi. Secara makro perkembangan perekonomian Kabupaten Way Kanan dicerminkan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pengeluaran penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

a. Pertumbuhan Ekonomi

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menggambarkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah.

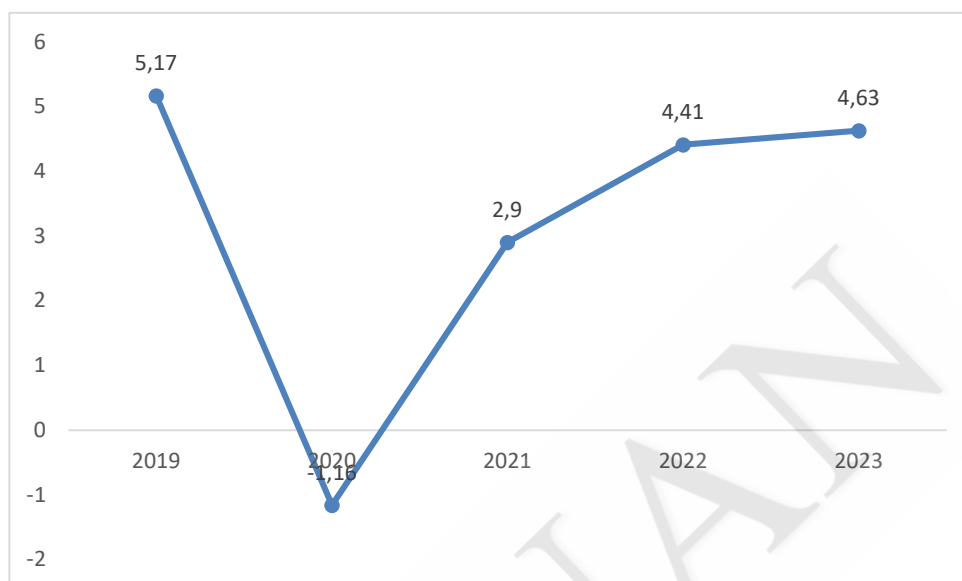
PDRB Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 sebesar 17.473,41 miliar rupiah dan 10.635,97 miliar rupiah menurut harga konstan.

Dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, PDRB tahun 2023 pertumbuhan sebesar 4,63 persen. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan sebesar 15,72 persen. Sektor Pertanian masih mendominasi distribusi persebaran PDRB menurut lapangan usaha. Sektor ini memiliki distribusi persentase PDRB sebesar 34,64 persen.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010, 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.245,71	3.257,03	3.263,31	3.358,48	3.358,71
B. Pertambangan dan Penggalian	433,45	448,23	447,80	473,50	512,89
C. Industri Pengolahan	2.151,85	1.986,56	2.101,49	2.138,23	2.183,41
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,88	10,78	11,23	11,87	12,61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,21	5,44	5,62	5,83	5,87
F. Konstruksi	846,01	825,74	888,11	898,85	977,14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.013,19	1.004,18	1.030,05	1.153,23	1.308,21
H. Transportasi dan Pergudangan	273,24	261,19	267,37	328,08	391,21
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79,19	76,04	74,74	79,26	89,78
J. Informasi dan Komunikasi	439,86	475,13	507,42	537,71	579,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	88,83	93,16	96,06	94,73	98,97
L. Real Estate	242,31	238,72	241,85	241,89	243,50



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
M,N. Jasa Perusahaan	4,88	4,81	4,86	4,86	5,10
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	307,27	321,92	335,45	335,73	338,52
P. Jasa Pendidikan	281,82	293,99	298,09	327,57	338,90
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96,02	106,73	111,41	110,11	115,28
R,S,T,U. Jasa lainnya	55,11	52,64	51,65	65,67	76,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL	9.573,83	9.462,29	9.736,51	10.165,60	10.635,97

Catatan : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan

b. Struktur Ekonomi

Jika pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, struktur ekonomi suatu wilayah dihitung berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Peranan terbesar perekonomian Way Kanan dihasilkan oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 6.052,96 miliar rupiah. Kategori kedua yang menyumbang peranan perekonomian Way Kanan adalah Industri Pengolahan dimana pada tahun 2023 kategori ini memberi kontribusi sebesar 3.588,89 (miliar rupiah).

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.857,84	4.965,97	5.087,23	5.769,67	6.052,96
B. Pertambangan dan Penggalan	640,03	675,1	682,51	740,94	860,3
C. Industri Pengolahan	3.287,33	3.061,28	3.332,34	3.479,73	3.588,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,37	13,43	14,47	15,42	16,83
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,77	8,14	8,5	8,91	9,04
F. Konstruksi	1.172,85	1.142,82	1.256,03	1.310,75	1.462,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.379,02	1.397,07	1.458,8	1.702,81	2.011,51
H. Transportasi dan Pergudangan	381,21	371,6	388,23	518,97	683,88
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	132,35	127,87	126,55	136,19	159,02
J. Informasi dan Komunikasi	548,83	589,49	611,85	650,41	721,95



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	135,72	141,8	153,87	161,95	170,29
L. Real Estate	315,25	316,98	323,35	326,22	335,45
M,N. Jasa Perusahaan	7,11	7,15	7,27	7,35	8,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	464,38	492,12	511,33	536,23	538,26
P. Jasa Pendidikan	424,84	448,45	464,25	515,26	546,84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134,86	151,18	161,1	175,01	189,39
R,S,T,U. Jasa lainnya	79,43	75,08	74,23	97,14	118,04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL	13.981,19	13.985,53	14.661,91	16.152,96	17.473,41

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan

c. Pengeluaran Penduduk

Penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 secara umum memiliki pengeluaran sebesar Rp959.578 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, sebesar 42,95 persen atau Rp412.098 digunakan untuk komoditi non makanan. Sementara sisanya 57,05 persen atau Rp547.480 digunakan untuk komoditi makanan. Dari pengeluaran yang dikeluarkan untuk komoditi makanan, pengeluaran untuk kelompok Makanan dan Minuman memiliki persentase terbesar. Kelompok ini memiliki persentase 23,44 persen. Di urutan berikutnya ada Rokok dengan persentase 15,03 persen dan Padi-padian 14,32 persen. Sisanya digunakan untuk komoditi makanan yang lain.

Sementara untuk pengeluaran di komoditi non makanan, pengeluaran terbesar penduduk Kabupaten Way Kanan banyak berada di kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga, dengan persentase 47,84 persen dari total pengeluaran non makanan. Di urutan berikutnya adalah Aneka komoditas dan jasa dengan 23,14 persen; Komoditas tahan lama 10,78 persen; Pajak, pungutan, dan asuransi dengan 8,07 persen; Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala dengan 6,87 persen; dan Keperluan Pesta dan Upacara 3,30 persen.

Tabel 2.4
Persentase Penduduk
Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan
di Kabupaten Way Kanan, 2022 dan 2023

Golongan Pengeluaran	2022	2023
<750.000	39,46	29,60
750.000 – 999.999	23,19	21,45
1.000.000 – 1.499.999	23,33	29,91
>= 1.500.000	14,02	13,75
Jumlah	100,00	94,71

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

d. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja secara konsep BPS adalah mereka yang berusia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data ketenagakerjaan di BPS diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dengan periode waktu pelaksanaan secara semesteran, untuk penghitungan indikator ketenagakerjaan hingga tingkat kabupaten, diperoleh dari pelaksanaan Sakernas bulan Agustus.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Way Kanan tahun 2022 sebanyak 248.708 jiwa atau dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 71.86 persen. Sementara tingkat pengangguran mencapai 3,28 persen.

Menurut lapangan pekerjaan, 59,91 persen angkatan kerja di Kabupaten Way Kanan bekerja di sektor Pertanian, 8,61 persen pada Sektor Manufaktur, dan 31,48 persen Sektor Jasa.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan utama bekerja sebanyak 240.541 jiwa atau sebesar 96,67 persen terhadap jumlah angkatan kerja.

Menurut status pekerjaan, sebesar 22,81 persen berusaha sendiri, sementara berusaha di bantu buruh tidak tetap mencapai 22,43 persen. Sebesar 20,31 persen berstatus buruh/ karyawan/pegawai, dan sebesar 21,95 persen berstatus sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 16,23 persen angkatan kerja tidak/belum pernah bersekolah atau tidak/belum tamat SD, 30,67 persen merupakan tamatan SD, 22,23 persen merupakan tamatan SMP, 17,50 persen merupakan tamatan SMA, 0,90 persen merupakan tamatan D1 hingga D3, dan 3,61 persen merupakan tamatan universitas.

Dalam menghadapi era industri 4.0, tentunya skill tenaga kerja juga harus ditingkatkan. Industri 4.0 tidak hanya soal kecanggihan teknologi yang digunakan akan tetapi juga kualitas ketenagakerjaan tidak kalah penting dan mesti menjadi perhatian kita semua.

e. Pendidikan

Jumlah lembaga sekolah di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 sebanyak 563 lembaga yang terdiri dari : 356 sekolah dasar (SD/ MI), 122 sekolah menengah (SMP/ MTs), 84 sekolah menengah atas (SMA/MA/SMK) dan 1 perguruan tinggi. Rasio murid guru pada tahun 2022 ditingkat SD/MI adalah sebesar 12,53, di tingkat SMP/MTs sebesar 12,45 dan di tingkat SMA/SMK/MA sebesar 11,87. Angka ini menunjukkan bahwa kira-kira satu orang guru mengampu sebanyak 11 atau 12 orang murid. Akan tetapi, jumlah ini belum mengakomodir pemerataan guru antar daerah.

Jika dilihat dari segi angka partisipasi murni, semakin tinggi level Pendidikan, semakin rendah pula angka partisipasinya. Tahun 2023 pada tingkat sekolah dasar, Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 99,88 persen. Ditingkat sekolah menengah pertama APM sebesar 81,31 persen dan di tingkat sekolah menengah atas hanya sebesar 62,49 persen.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.5
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Way Kanan, 2022 dan 2023

Uraian	APM		APK	
	2022	2023	2022	2023
SD/MI/Sederajat	99,05	99,88	108,23	107,42
SMP/MTs/Sederajat	79,67	81,31	87,55	89,99
SMA/SMK/Sedderajat	61,78	62,49	88,90	89,51

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan

f. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.

Semua komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita naik 4,62 persen atau meningkat 437.000 rupiah dibandingkan tahun 2022. Dari dimensi pengetahuan, anak-anak berusia 7 tahun di Kabupaten Way Kanan memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,43 tahun. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas adalah 7,74 tahun, lebih lama 0,02 tahun dibanding tahun 2022.

Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 di Kabupaten Way Kanan memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,11 tahun, lebih lama 0,18 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

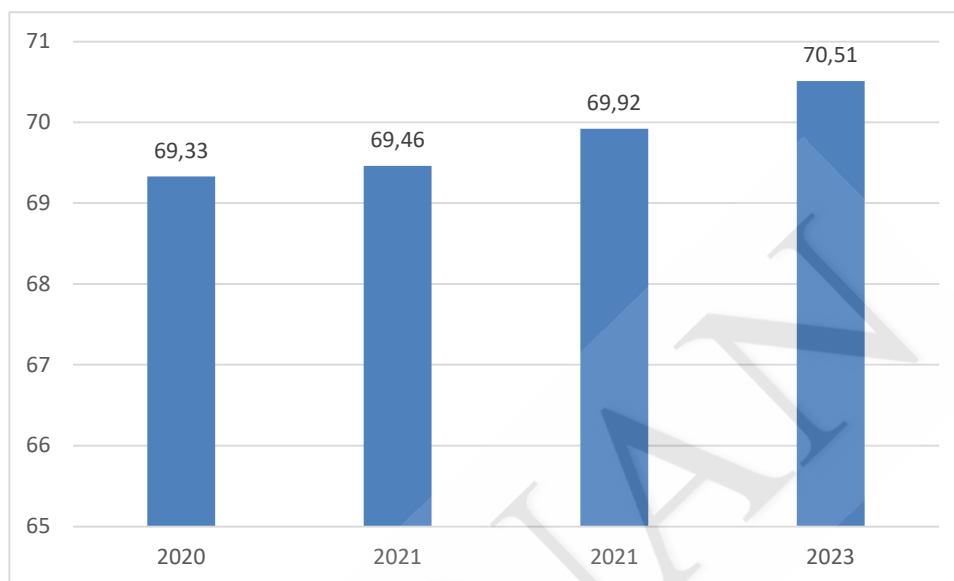
Pembangunan manusia di Kabupaten Way Kanan terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2023 status pembangunan manusia Kabupaten Way Kanan mencapai level "tinggi", setelah tiga tahun sebelumnya berada pada level "sedang". Selama tahun 2020-2023, IPM Kabupaten Way Kanan rata-rata meningkat sebesar 0,56 persen per tahun, dari 69,33 pada tahun 2020 menjadi 70,51 pada tahun 2023.

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator ini mengalami percepatan pertumbuhan cukup tinggi dibandingkan indikator lainnya, yaitu dilihat dari peningkatan pengeluaran riil per kapita sebesar 4,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya 3,02 persen. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga meningkat dari 0,13 persen menjadi 0,26 persen. Sementara Harapan Lama Sekolah pertumbuhannya menurun dari 0,40 persen menjadi 0,08 persen dan Umur Harapan Hidup (UHH) pertumbuhannya menurun dari 0,27 persen menjadi 0,24 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Gambar 2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2020-2023

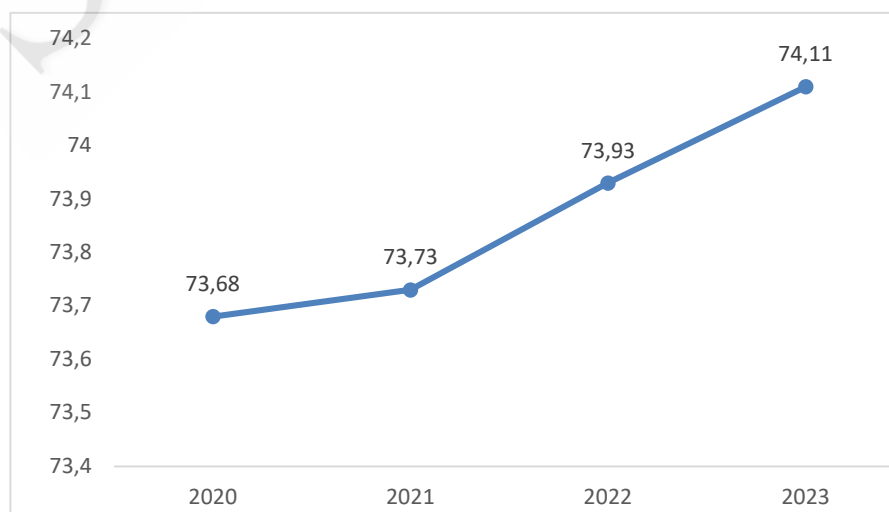


Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan

1) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,43 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2020 UHH kabupaten Way Kanan mencapai 73,68 dan pada tahun 2023 mencapai 74,11 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,18 tahun dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,24 persen dibandingkan UHH tahun sebelumnya. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Kabupaten Way Kanan tahun 2021 mengalami pertumbuhan dibawah rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,07 persen per tahun).

Gambar 2.3
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), 2020-2023



Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

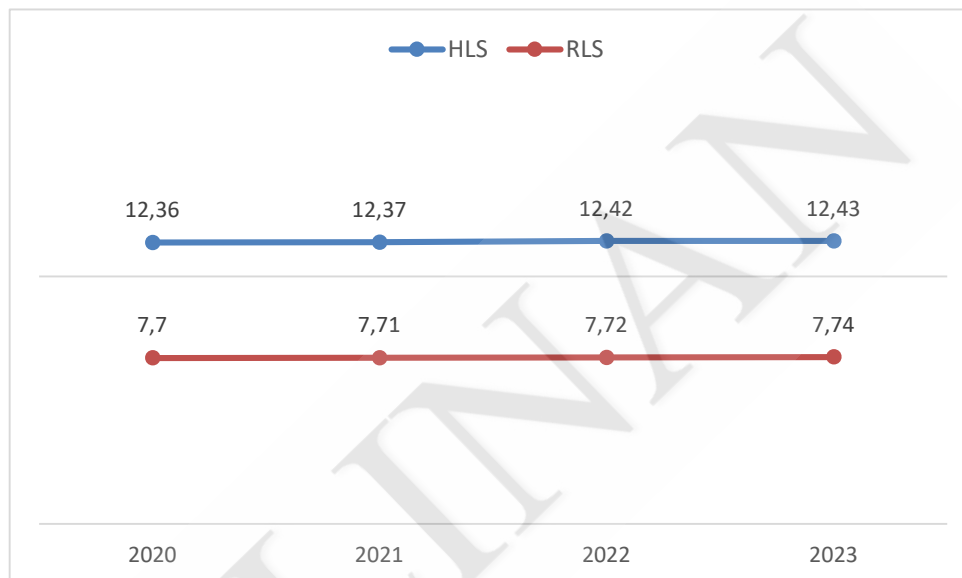
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Kabupaten Way Kanan telah meningkat 0,07 tahun, sementara RLS meningkat 0,04 tahun.

Gambar 2.4
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2020-2023



Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan

3) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil perkapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Way Kanan mencapai 9,89 juta rupiah per tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 437 ribu rupiah. Capaian ini meningkat 4,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2020-2022 yang sebesar 1,90 persen.

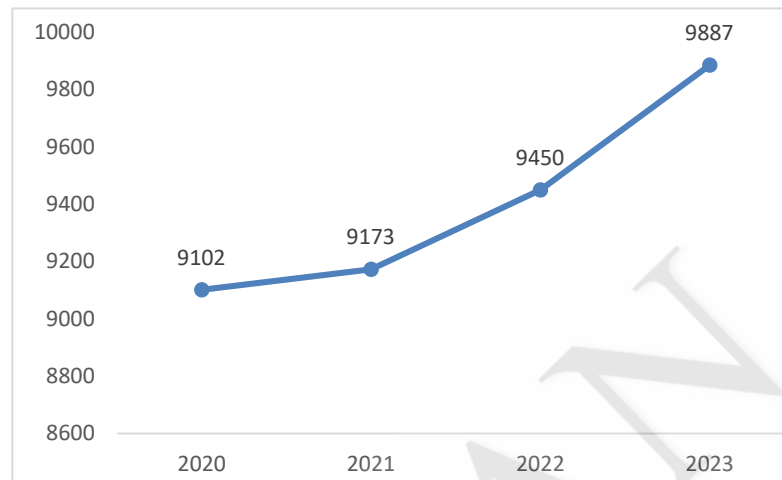


PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Gambar 2.5
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP), 2020-2023 (Rp000)



Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan

Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Lampung, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari status capaian, terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian IPM di Kabupaten Way Kanan. Sejak tahun 2020, IPM Kabupaten Way Kanan berada pada level "sedang" ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Way Kanan meningkat menjadi level "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Namun, IPM Kabupaten Way Kanan masih berada di bawah IPM Provinsi Lampung, yang sebesar 72,48. IPM Kabupaten Way Kanan menduduki peringkat ke-10 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan nilai IPM sebesar 70,5%. Sedangkan, empat kabupaten di Provinsi Lampung berada pada level "sedang", yaitu Kabupaten Tanggamus (69,93), Kabupaten Pesawaran (69,46), Kabupaten Mesuji (67,79), dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (69,38). Urutan IPM teratas di Provinsi Lampung ditempati oleh Kota Bandar Lampung (79,86). Nilai IPM kabupaten/kota lainnya, yaitu Lampung Utara (70,78), Lampung Selatan (71,55), Tulang Bawang (71,56), Lampung Barat (71,72), Lampung Timur (72,44), Pringsewu (73,11), Lampung Tengah (73,39), dan Kota Metro (79,85).

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 diarahkan untuk :

1. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, kegiatan yang bersifat lanjutan, kegiatan yang bersifat terobosan, kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Kabupaten Way Kanan secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Way Kanan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2. Langkah konsolidasi fiskal daerah, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi, dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.
3. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah dan peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
4. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2022, yaitu: (1) Tata Kelola Pemerintahan; (2) Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar; (3) Revitalisasi Pertanian; (4) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (5) Keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar Kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pasal 30 yang menyebutkan bahwa Pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu:

- 1) Pendapatan asli daerah.
- 2) Pendapatan transfer.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 untuk pendapatan daerah, yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Way Kanan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- 1) Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- 2) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan.
- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, dan instansi terkait.
- 6) Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi Pendapatan Asli Daerah adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Penyusunan dan penyempurnaan dasar hukum pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan PAD.
- 3) Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan PAD.
- 4) Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
- 5) Pemberian reward bagi wajib pajak berprestasi.
- 6) Peningkatan fungsi kontrol di dalam maupun antar OPD/unit kerja dalam pengelolaan PAD.
- 7) Peningkatan upaya penertiban atas pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh masyarakat.
- 8) Optimalisasi denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan/atau retribusi.
- 9) Peningkatan kompetensi personil OPD pengelola PAD melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis pengelolaan PAD.
- 10) Penyusunan data base potensi PAD.
- 11) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
- 12) Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan.
- 13) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan.

Beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk meningkatkan perolehan dana transfer adalah:

- 1) Meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam hal kebutuhan anggaran pembangunan daerah, sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
- 2) Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU, yang meliputi variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, serta data alokasi dasar.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terhadap kebutuhan DAK untuk mendorong pelaksanaan belanja daerah yang efisien dan efektif ke arah peningkatan pencapaian SPM pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
- 4) Peningkatan koordinasi dan komunikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perolehan DAK yang bersumber dari pergeseran anggaran kementerian negara/lembaga (dana dekonsentrasi) yang sudah menjadi urusan daerah.

Dalam pencapaian target peningkatan pendapatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berupaya meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kebijakan antara lain:

- 1) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.
- 2) Koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian teknis dan lembaga non pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan OPD teknis terkait.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 ayat (2), Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

- 1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN.
 - b) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
 - c) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - d) Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e) Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang dirinci atas jenis :
 - a) Belanja bagi hasil, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Belanja bantuan keuangan, diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah, dimana penguatan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam mengembangkan perekonomian daerah serta pencapaian IPM di Kabupaten Way Kanan. adapun langkah pencapaian strategi melalui 3 (tiga) aspek antara lain: (a) aspek kesejahteraan masyarakat (b) aspek pelayanan umum dan (c) aspek daya saing daerah.

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1) Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

Pada pos belanja pegawai diperuntukan antara lain, (a) diperhitungkan acress sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi pegawai, (b) untuk antisipasi pengangkatan Calon Aparatur Sipil Daerah daerah sesuai Formasi pegawai 2020, (c) pembayaran gaji/tunjangan, (d) Tambahan penghasilan yang ditetapkan Pemerintah (e) Biaya Pemungutan Pajak Daerah (f) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

b) Belanja Barang dan Jasa

Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran berkenaan.

Penganggaran belanja barang yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi kewenangan daerah yang berpotensi



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

menjadi Pendapatan Asli Daerah, pemerintah kabupaten memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan PBB-P2.

c) Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Belanja Subsidi.

Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

e) Belanja Hibah

Belanja hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Belanja hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan generasi muda, organisasi sosial keagamaan, organisasi sosial wanita, sosial cacat netra, sosial kewartawanan, sosial pendidikan, dan belanja bantuan partai politik.

Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2) Belanja Modal

Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran berkenaan dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang yang belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4) Belanja Transfer

a) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk bagi hasil kepada pemerintah kampung disesuaikan dengan rencana pendapatan pada tahun 2023. Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa disesuaikan dengan rencana pendapatan tahun anggaran 2023, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2022 yang belum terealisasi ditampung dalam APBD tahun anggaran 2023.

b) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk belanja keuangan kepada pemerintah kampung, antara lain untuk alokasi dana kampung, tunjangan penghasilan pemerintah kampung dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Way Kanan menganggarkan bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima untuk Desa/kampung paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterimanya kecuali DAK. Yang pembagiannya untuk setiap desa/kampung secara proposional dengan keputusan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kampung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 ayat (3) Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- 1) SiLPA.
- 2) pencairan Dana Cadangan.
- 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) penerimaan Pinjaman Daerah.
- 5) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- 6) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk Pembiayaan :

- 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo.
- 2) penyertaan modal daerah.
- 3) pembentukan Dana Cadangan.
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah.
- 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 secara garis besar bersumber dari SiLPA

Pengeluaran daerah selalu disesuaikan dengan penerimaan. Pola pengeluaran mengalami perubahan, dari pengeluaran pembangunan dan rutin menjadi pengeluaran aparatur, publik, dan belanja modal. Perubahan lain adalah pengeluaran didasarkan pada fungsi belanja. Perubahan pola pengeluaran ini sejalan dengan upaya peningkatan anggaran melalui penerapan anggaran kinerja.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 secara garis besar bersumber dari Penyertaan modal (investasi) daerah kepada BUMD.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah TA 2023 belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tergambar pada Pendapatan Daerah TA 2023 yang ditargetkan sebesar Rp1.361.130.364.439,47 terealisasi sebesar Rp1.335.032.575.065,75 atau 98,08%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 tidak dapat diserap sebesar Rp26.097.789.373,72. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 yang tercatat sebesar Rp1.315.948.727.618,44 realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,45%.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah TA 2023 ditargetkan sebesar 1.395.535.691.960,00 dan terealisasi sebesar Rp1.347.023.503.692,66 atau 96,52%. Dengan demikian dari anggaran belanja daerah yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp48.512.188.267,34. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.298.465.949.488,06 terlihat realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,74%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah Tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. APBD Kabupaten Way Kanan TA 2023 mengalami defisit. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.335.032.575.065,75 sedangkan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp1.347.023.503.692,66 sehingga kinerja keuangan daerah TA 2023 mengalami surplus sebesar Rp21.644.902.843,62.

c. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023 dari sisi penerimaan sebesar Rp36.435.831.470,53 dan dari sisi pengeluaran sebesar Rp2.800.000.000,00. Dengan demikian realisasi netto Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp 33.635.831.470,5.

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tersebut dapat dilihat posisi SiLPA TA 2023 sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendapatan yang tidak mencapai target di TA 2023 | Rp 26.097.789.373,72 |
|---|----------------------|



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2.	Sisa anggaran belanja dan transfer yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir TA 2023	Rp	48.512.188.267,34
3.	Pembiayaan yang kurang dari target	Rp	769.496.050,00
	Dengan demikian jumlah SiLPA TA 2023 tercatat sebesar	Rp	21.644.902.843,62

Dari realisasi pendapatan, belanja dan transfer dan pembiayaan tersebut diatas dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada pelaksanaan APBD TA 2023 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
4	Pendapatan	1.361.130.364.439,47	1.335.032.575.065,75	98,08	1.315.948.727.618,44
4.1	Pendapatan Asli Daerah	81.405.102.578,47	79.453.552.185,75	97,60	77.242.579.541,44
4.2	Dana Perimbangan	968.669.384.000,00	964.615.308.961,00	99,58	969.060.230.917,00
4.3	Transfer Lainnya	311.055.877.861,00	290.927.017.248,00	93,53	269.273.684.950,00
4.4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	36.696.671,00	0,00	372.232.210,00
5	Belanja	1.395.535.691.960,00	1.347.023.503.692,66	96,52	1.298.465.949.488,06
5.1	Belanja Operasi	980.112.804.842,00	948.989.894.437,86	96,82	916.159.561.718,09
5.2	Belanja Modal	120.746.562.353,00	107.713.480.015,54	89,21	109.116.148.013,92
5.3	Belanja Tidak Terduga	700.000.000,00	257.796.125,00	36,83	1.518.368.696,00
5.4	Belanja Transfer	293.976.324.765,00	290.062.333.114,26	98,67	271.671.871.060,05
	Surplus/Defisit	(34.405.327.520,53)	(11.990.928.626,91)	34,85	17.482.778.130,38
7	Pembiayaan				
7.1	Penerimaan Pembiayaan	37.205.327.520,53	36.435.831.470,53	97,93	22.222.549.390,15
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
7.3	Pembiayaan Netto	34.405.327.520,53	33.635.831.470,53	97,76	19.722.549.390,15
	SiLPA	0,00	21.644.902.843,62		37.205.327.520,53

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Keuangan

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan TA 2023, antara lain:

- Masih kurang optimalnya pengelolaan pendapatan yang ada di Kabupaten Way Kanan baik pajak daerah maupun retribusi daerah;
- Masih kurangnya SDM dalam bidang-bidang tertentu yang dapat diandalkan dalam menjawab tantangan yang semakin beragam;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- Karena sebagian besar wilayah pedesaan dan mata pencarian bertani, maka sektor jasa yang dapat menjadi objek PAD masih sangat sedikit;
- Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia;



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- f. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

- Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan instansi vertikal lainnya;
- Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Beberapa strategi dan langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

- Pemutakhiran data wajib pajak.
- Pendataan wajib pajak baru.
- Penetapan ulang besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- Melakukan kegiatan monitoring pajak restoran/rumah makan.
- Meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pajak mulai dari pendataan dan diterbitkannya SKPD hingga diterimanya setoran pajak pada Kas Daerah.
- Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para wajib pajak terhadap kewajibannya, melalui kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang bagi hasil pajak Provinsi.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- Melaksanakan koordinasi dengan Instansi vertikal dan Dinas Teknis Daerah.

Sementara kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilaksanakan adalah:

- Menyebarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB ke masyarakat yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan tetapi belum dikenakan PBB;
- Menerbitkan Instruksi bupati Way Kanan agar seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjadi panutan membayar PBB;
- Mengadakan rapat evaluasi pencapaian penerimaan PBB dengan para Kepala SKPD, Camat dan Kepala Kampung/Lurah setiap 1 bulan sekali;
- Memberikan insentif kepada Kepala Kampung/Lurah dan Camat yang prosentase pelunasan PBB di wilayahnya paling tinggi.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

BAB IV
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Anggaran

a. Program yang bersumber dari APBD

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peranan OPD.

Dalam APBD Kabupaten Way Kanan TA 2023, Belanja dianggarkan sebesar Rp1.395.535.691.960,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.347.023.503.692,66 yang tersebar pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Secara umum capaian program TA 2023 cukup baik dan menggembirakan, namun demikian tetap diperlukan peningkatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 dari ukuran keuangan rata-rata telah mencapai 96,52%.

Pemerintahan Kabupaten Way Kanan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Eksternalitas, yaitu kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Akuntabilitas, yaitu kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat.
3. Efisiensi, yaitu kriteria pembagian urusan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Berdasarkan urusan pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat berikut ini:

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi TA 2023 Berdasarkan Urusan

(dalam rupiah)

URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	781.005.615.269,00	748.557.960.718,40	95,85
Pendidikan			
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	441.406.033.416,00	433.686.086.688,00	98,25
Kesehatan			
- Dinas Kesehatan	182.953.119.498,00	171.860.860.592,00	93,94
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
- Dinas Pekerjaan Umum	124.571.233.501,00	112.672.935.784,40	90,45
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	13.616.028.871,00	12.537.246.268,00	92,08



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.245.220.915,00	13.013.950.881,00	98,25
Sosial			
- Dinas Sosial	5.213.979.068,00	4.786.880.505,00	91,81
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	67.140.386.683,00	63.527.113.536,00	94,62
Tenaga Kerja			
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.291.069.182,00	3.236.885.750,00	98,35
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.887.791.254,00	6.622.811.331,00	96,15
Pangan			
- Dinas Ketahanan Pangan	2.769.908.584,00	2.667.689.429,00	96,31
Pertanahan			
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	470.738.000,00	433.627.162,00	92,12
Lingkungan Hidup			
- Dinas Lingkungan Hidup	5.368.664.490,00	5.140.125.934,00	95,74
Administrasi Kependudukan dan Capil			
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.163.975.034,00	5.993.624.141,00	97,24
Pemberdayaan Masyarakat Desa			
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	6.796.834.585,00	6.417.534.877,00	94,42
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.673.152.150,00	5.598.888.950,00	83,90
Perhubungan			
- Dinas Perhubungan	3.189.716.320,00	3.057.818.798,00	95,86
Komunikasi dan Informatika			
- Dinas Komunikasi dan Informatika	7.520.359.255,00	7.421.199.791,00	98,68
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.446.200.335,00	4.377.096.156,00	98,45
Penanaman Modal			
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.775.266.464,00	4.577.921.913,00	95,87
Kepemudaan dan Olah Raga			
- Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.450.305.248,00	4.319.287.171,00	97,06
Statistik			
- Dinas Komunikasi dan Informatika	120.145.200,00	112.954.982,00	94,02
Persandian			
- Dinas Komunikasi dan Informatika	43.184.000,00	31.250.110,00	72,37
Kebudayaan			
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	805.781.500,00	362.087.961,00	44,94
Perpustakaan			
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	679.701.500,00	646.102.210,00	95,06
Kearsipan			
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.687.593.582,00	2.510.206.870,00	93,40
URUSAN PILIHAN	31.048.365.794,00	29.698.308.825,00	95,65



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Kelautan dan Perikanan			
- Dinas Perikanan	3.228.438.610,00	3.010.715.915,00	93,26
Pariwisata			
- Dinas Pemuda dan Olah Raga	293.672.000,00	285.972.500,00	97,38
Pertanian			
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	21.229.117.245,00	20.211.981.418,00	95,21
Perdagangan			
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.210.260.000,00	1.196.804.401,00	98,89
Perindustrian			
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.757.086.789,00	4.663.149.170,00	98,03
Transmigrasi			
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	329.791.150,00	329.685.421	99,97
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	516.341.324.214,00	505.240.120.613,26	97,85
Administrasi Pemerintahan			
- Sekretariat Daerah Kabupaten	53.322.347.042,00	51.590.735.142,00	96,75
Pengawasan			
- Inspektorat Kabupaten Way Kanan (Itkab)	11.730.716.846,00	11.442.054.656,00	97,54
Perencanaan			
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.329.917.206,00	5.936.410.191,00	93,78
Keuangan			
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	336.864.479.117,00	331.242.914.164,26	98,33
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.636.783.820,00	2.499.502.368,00	94,79
Kepegawaian			
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.844.821.398,00	2.834.548.671,00	99,64
Pendidikan dan Pelatihan			
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.368.595.000,00	1.366.377.850,00	99,84
Penelitian dan Pengembangan			
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	593.192.600,00	491.378.341,00	82,84
Sekretariat DPRD			
- Sekretariat DPRD	47.377.747.736,00	46.293.023.017,00	97,71
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan			
- Kecamatan	32.636.056.323,00	30.968.517.691,00	94,89
Kesatuan Bangsa dan Politik			
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.636.667.126,00	20.574.658.522,00	99,70
JUMLAH	1.395.535.691.960,00	1.347.023.503.692,66	96,52

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Program

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2023 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan dan ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

- Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersedia secara memadai.
- Pemberian penghargaan terhadap aparatur sudah memadai.
- Meningkatnya pemahaman dari para pengelola kegiatan dalam melaksanakan



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

kegiatan yang diembannya;

- d. Tersedia media baik bagi masyarakat dan OPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk forum musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat OPD;
- e. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

- a. Kapasitas dan kapabilitas aparatur pengelola keuangan OPD belum merata, sehingga pencapaian akuntabilitas belum tercapai.
- b. Komitmen organisasi baik pimpinan level atas, menengah dan bawah belum maksimal.
- c. Dalam hal penempatan pegawai kurang memperhatikan aspek latar belakang pendidikan dan keahlian aparatur.
- d. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
- e. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedia petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
- f. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1 Pendahuluan

Penyusunan laporan keuangan Kabupaten Way Kanan TA 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Selain itu penyusunan laporan keuangan TA 2023 mengacu pada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan penyusunan dimungkinkan melakukan penyesuaian–penyesuaian akuntansi namun demikian tetap mengacu pada kaidah-kaidah akuntansi secara umum. Oleh karena itu dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan TA 2023 menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sesuai SAP.

5.2 Entitas

a. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang melaksanakan proses akuntansi pemerintahan, dalam hal ini dilaksanakan oleh OPD dan SKPKD. Sebagai Entitas Akuntansi maka OPD dan SKPKD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah organisasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Entitas pelaporan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD sekaligus juga merupakan salah satu entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Untuk RSUD Zainal Abidin Pagar Alam selain merupakan OPD juga sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka mekanisme pengelolaan keuangannya dilakukan dengan mekanisme OPD dan juga BLUD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu seluruh puskesmas di Kabupaten Way Kanan tahun 2023 sudah mengelola keuangannya dengan mekanisme BLUD, dan setiap bulannya melalui Dinas Kesehatan menyampaikan permohonan pengesahan pendapatan dan belanja kepada BUD. Penganggaran dan pelaporannya dilakukan dengan menginduk pada dokumen anggaran dan laporan keuangan Dinas Kesehatan.

5.3 Basis Akuntansi

a. Basis Akuntansi Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan yang direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan BLUD atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

b. Basis Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer

Pencatatan atas pengakuan beban dilakukan dengan menggunakan pendekatan beban yaitu semua pembelian barang dan jasa diakui/dicatat sebagai beban karena diasumsikan semua barang dan jasa akan segera digunakan. Beban penyisihan piutang dicatat berdasarkan umur/kategori piutang. Beban penyusutan aset tetap dicatat dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis masing-masing aset tetap, dan aset tetap yang diperoleh tahun berjalan dihitung dengan pembebanan bulanan sejak aset tetap dikuasai/dimiliki. Beban penyisihan dana bergulir dipersamakan dengan penghitungan piutang lainnya.

Transfer keluar (beban transfer) di LO dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah. Beban Transfer merupakan beban pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Untuk pengakuan belanja dalam penyusunan LRA tetap menggunakan basis kas. Belanja dan transfer keluar serta pengeluaran pembiayaan di LRA diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening kas daerah atau pertanggungjawaban belanja oleh bendahara pengeluaran telah disahkan oleh pengguna anggaran.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, baik yang telah dibayar maupun yang masih terutang. Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yaitu sebesar nilai bruto SP2D jika belanja dilaksanakan dengan mekanisme langsung (LS), dan atau sejumlah pengeluaran kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto jika dilaksanakan dengan mekanisme uang persediaan (UP) OPD.

Beban dinilai sebesar akumulasi yang terjadi selama satu periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun yang masih terutang dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi ekonomi.

c. Basis Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

berdasarkan nilai sekarang, kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang, kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Basis Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e. Basis Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang diakui pada saat timbulnya klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang diklasifikasikan kedalam piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Piutang dana transfer dicatat pada akhir tahun anggaran sebesar nilai alokasi yang belum diterima oleh pemerintah daerah selama tahun anggaran yang telah berjalan, atau alokasi kurang bayar yang telah memiliki ketetapan. Piutang yang dapat dihapusbukukan adalah piutang macet atau dengan alasan lain yang sah. Piutang pajak dapat dihapusbukukan jika telah berusia 5 tahun atau lebih. Piutang retribusi dapat dihapusbukukan jika telah berusia 3 tahun atau lebih. Piutang selain piutang pajak dan retribusi dapat dihapusbukukan jika telah berusia 5 tahun atau lebih dan memiliki dasar yang kuat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusbukuan piutang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Piutang dilakukan penyisihan piutang berdasarkan jenis dan objek piutang, piutang dengan kategori lancar disisihkan 0,5%. Kurang lancar 10%, diragukan 50% dan macet 100%. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

f. Basis Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara donasi, hibah atau lainnya yang tidak diperoleh nilai atau harganya. Pengakuan beban persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan beban dan disesuaikan diakhir tahun berdasarkan hasil *stock opname*.

g. Basis Akuntansi Investasi

Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek yaitu apabila akan segera diperjualbelikan/dicairkan dalam jangka waktu 3 bulan sampai 12 bulan. Investasi jangka panjang yaitu apabila akan diperjualbelikan/dicairkan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Pengukuran investasi jangka pendek yaitu sebesar biaya perolehan untuk surat berharga, dicatat sebesar nilai nominalnya jika berbentuk deposito atau sejenisnya. Investasi jangka panjang dibagi dua yaitu Investasi Jangka Panjang Non-permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang permanen terdapat pada penyertaan modal pada PT Bank Lampung, PT BPRS Way Kanan dan PT Way Kanan Makmur.

Penilaian investasi jangka panjang ini menggunakan metode biaya untuk PT Bank Lampung dan metode ekuitas untuk investasi pada PT BPRS Way Kanan dan PT Way Kanan Makmur. Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Investasi Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Penggunaan metode-metode tersebut didasarkan pada kriteria kepemilikan, jika kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya, jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas dan jika kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan.

h. Basis Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk penilaian aset tetap tanah peruntukan ruas jalan apabila belum memiliki biaya perolehan maka dinilai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi pada kampung/dusun berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai bersih tercatat aset tetap dalam neraca dan dilaporkan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi, Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat, Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang, Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap daerah adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, rekapitalisasi, renovasi, dan restorasi serta dari belanja pemeliharaan. Aset tetap diakui dan dicatat berdasarkan prinsip harga perolehan, maka penganggaran belanja modal untuk perolehan aset tetap yang dikapitalisasi menjadi aset tetap ditetapkan batasan minimumnya, serta belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang ditujukan sebagai pendukung dan/atau pelengkap dan/atau bagian dari biaya untuk kegiatan memperoleh aset tetap tertentu, maka biaya-biaya tersebut dikapitalisasi menjadi penambah aset tetap yang diperoleh. Belanja modal ditambah biaya-biaya untuk memperoleh aset tetap yang dikapitalisasi ditetapkan besaran minimumnya.

i. Basis Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jembatan, irigasi dan jaringan yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Suatu konstruksi harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Way Kanan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan.
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

j. Basis Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Untuk pembentukan dana cadangan ini harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari rekening umum kas daerah ke rekening dana cadangan. Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 tidak memiliki Dana Cadangan, oleh karena itu kebijakan akuntansi dana cadangan tidak perlu diungkapkan.

k. Basis Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya diklasifikasikan menjadi:

1) Tagihan jangka panjang

a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Umum Daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Dalam LKPD tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak memiliki aset lainnya berupa tagihan penjualan angsuran, oleh karena itu kebijakan akuntansi yang terkait hal ini, tidak perlu diungkapkan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- (1) TP dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
- (2) TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggungjawab Mutlak (SKTM) atau surat keputusan pembebanan pengganti kerugian (SKP2K) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

a) Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kemitraan sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

c) Bangun Guna Serah (BGS) / *Build, Operate, Transfer* - BOT

BGS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Way Kanan oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi) dan dilaksanakan dengan gratis, atau dengan kompensasi yang sangat kecil. Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari aset tetap.

d) Bangun Serah Guna (BSG) / *Bulid, Transfer, Operate* - BTO

BSG adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Way Kanan oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan disertai dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Dalam LKPD Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak memiliki kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS, BSG), oleh karena itu kebijakan akuntansi yang terkait dengan kemitraan dengan pihak ketiga tidak perlu diungkapkan.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik namun dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Aset tidak berwujud meliputi:

- a) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku;
- b) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu, jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain;

- c) Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten atau hak cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu;

- d) Royalti yaitu nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain;

- e) Hak cipta (*copyright*)/paten

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan;

- f) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak cipta atau paten pada dasarnya adalah kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah;

- g) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

4) Aset Lain-lain

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset lain-lain adalah akun untuk menampung aset tetap yang telah dihentikan dari penggunaan aktifnya dikarenakan rusak berat, usang atau sedang proses pemindahtanganan.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Way Kanan.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

I. Basis Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VI
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

6.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Secara umum dapat dijelaskan untuk APBD TA 2023 Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.361.130.364.439,47 terealisasi Rp1.335.032.575.065,75 atau 98,08% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp1.395.535.691.960,00 terealisasi Rp1.347.023.503.692,66 atau 96,52%. Adapun kontribusi masing-masing pos dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.361.130.364.439,47 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp1.335.032.575.065,75 atau 98,08% dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah	81.405.102.578,47	79.453.552.185,75	77.242.579.541,44
2. Pendapatan Transfer	1.279.725.261.861,00	1.255.542.326.209,00	1.238.333.915.867,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	36.696.671,00	372.232.210,00
Jumlah	1.361.130.364.439,47	1.335.032.575.065,75	1.315.948.727.618,44

Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 merupakan kontribusi dari realisasi pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD secara keseluruhan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp79.453.552.185,75 dengan rincian di bawah ini:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Pajak Daerah	21.757.000.000,00	22.873.383.491,14	19.723.432.197,04
2. Pendapatan Retribusi Daerah	2.287.507.100,00	2.419.262.670,00	2.308.149.197,43
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.145.471.831,00	5.379.146.380,59	5.013.842.240,52
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	52.215.123.647,47	48.781.759.644,02	50.197.155.906,45
Jumlah	81.405.102.578,47	79.453.552.185,75	77.242.579.541,44

Dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun 2022 maka realisasi PAD TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.210.972.644,31.

Kinerja PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp21.757.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.873.383.491,14 atau 105,13%. Bila dibanding realisasi TA 2022 maka realisasi Pajak Daerah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Rp3.149.951.294,10 sebagaimana terlihat pada dibawah ini:

Pajak Daerah :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pajak Hotel	22.000.000,00	23.809.490,00	24.196.000,00
2. Pajak Restoran	1.700.000.000,00	2.171.527.134,00	2.161.534.859,20
3. Pajak Reklame	225.000.000,00	206.629.845,00	240.328.209,00
4. Pajak Penerangan Jalan	10.300.000.000,00	10.751.475.919,60	9.796.027.978,76
5. Pajak Parkir	125.000.000,00	120.625.705,00	126.849.400,00
6. Pajak Air Tanah	615.000.000,00	640.255.739,10	702.873.097,10
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	570.000.000,00	579.632.675,00	503.416.154,00
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.500.000.000,00	7.728.388.981,44	5.799.838.466,98
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	700.000.000,00	651.038.002,00	368.368.032,00
Jumlah	21.757.000.000,00	22.873.383.491,14	19.723.432.197,04

Pajak Daerah Kabupaten Way Kanan seluruhnya dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp2.287.507.100,00 dan terealisasi sebesar Rp2.419.262.670,00 atau 105,76%. Bila dibanding realisasi TA 2022 maka realisasi Retribusi Daerah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp111.113.472,57 sebagaimana terlihat pada dibawah ini:

Retribusi Daerah :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Retribusi Jasa Umum	824.646.400,00	957.562.177,00	814.369.111,00
2. Retribusi Jasa Usaha	942.860.700,00	711.982.370,00	565.222.850,00
3. Retribusi Perizinan Tertentu	520.000.000,00	749.718.123,00	928.557.236,43
Jumlah	2.287.507.100,00	2.419.262.670,00	2.308.149.197,43

(1) Retribusi Jasa Umum

Tahun 2023 realisasi retribusi jasa umum sebesar Rp957.562.177,00 dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	209.646.400,00	191.245.000,00	155.111.000,00
3. Retribusi Pelayanan Pasar	190.000.000,00	234.113.500,00	212.248.500,00
4. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.000.000,00	25.010.000,00	24.558.000,00
5. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	507.193.677,00	422.451.611,00
Jumlah	824.646.400,00	957.562.177,00	814.369.111,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

OPD yang mengelola Retribusi Jasa Umum dengan rincian sebagai berikut:

OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	169.646.400,00	151.195.000,00	89,12
Dinas Lingkungan Hidup	40.000.000,00	40.050.000,00	100,13
2. Retribusi Pelayanan Pasar			
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	190.000.000,00	234.113.500,00	123,22
3. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang			
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000,00	25.010.000,00	100,04
4. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi			
Dinas Komunikasi dan Informatika	400.000.000,00	507.193.677,00	126,80
Jumlah	824.646.400,00	957.562.177,00	116,12

(2) Retribusi Jasa Usaha

Tahun 2023 realisasi retribusi jasa usaha sebesar Rp711.982.370,00 dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Jasa Usaha :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	517.968.000,00	307.621.220,00	254.239.100,00
2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	262.892.700,00	261.775.500,00	185.973.000,00
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir	68.000.000,00	60.086.000,00	48.248.000,00
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	7.000.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00
5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	87.000.000,00	79.999.650,00	70.762.750,00
Jumlah	942.860.700,00	711.982.370,00	565.222.850,00

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat realisasi sebesar Rp307.621.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	267.958.000,00	214.971.220,00
2. Retribusi Penyewaan Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00
3. Retribusi Pemakaian Alat	240.010.000,00	82.650.000,00
Jumlah	517.968.000,00	307.621.220,00

Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terdapat realisasi sebesar Rp79.999.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	20.000.000,00	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :

2. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
67.000.000,00	59.999.650,00
87.000.000,00	79.999.650,00

Jumlah

OPD yang mengelola Retribusi Jasa Usaha dengan rincian sebagai berikut:

OPD

1. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	160.000.000,00	71.250.000,00	44,53
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	267.958.000,00	214.971.220,00	80,23
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	80.010.000,00	11.400.000,00	14,25
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

2. **Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan	262.892.700,00	261.775.500,00	99,58
-------------------------------------	----------------	----------------	-------

3. **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Dinas Perhubungan	68.000.000,00	60.086.000,00	88,36
-------------------	---------------	---------------	-------

4. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

Dinas Pemuda dan Olah Raga	7.000.000,00	2.500.000,00	35,71
----------------------------	--------------	--------------	-------

5. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.000.000,00	46.959.500,00	85,38
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.000.000,00	13.040.150,00	
Dinas Perikanan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00

Jumlah

942.860.700,00	711.982.370,00	74,45
-----------------------	-----------------------	--------------

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Tahun 2023 realisasi retribusi perizinan tertentu sebesar Rp749.718.123,00 dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Perizinan Tertentu :

	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	520.000.000,00	749.718.123,00	928.557.236,43
Jumlah	520.000.000,00	749.718.123,00	928.557.236,43

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2023 realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp5.145.471.831,00 dan terealisasi sebesar Rp5.379.146.380,59 atau 104,54%. Bila dibanding realisasi TA 2022 maka realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp229.718.123,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. PT. Bank Lampung	3.695.471.831,00	3.695.471.831,59	3.472.182.448,52
2. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	1.450.000.000,00	1.683.674.549,00	1.541.659.792,00
Jumlah	5.145.471.831,00	5.379.146.380,59	5.013.842.240,52

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos pajak daerah, retribusi daerah, ataupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada pelaksanaan TA 2023 realisasinya sebesar Rp48.781.759.644,02 dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain PAD yang Sah:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	507.026.441,00	1.481.868.759,00
2. Penerimaan Jasa Giro	832.529.537,00	2.112.556.783,89	2.046.983.748,34
3. Pendapatan Bunga	41.725.943,00	319.757.180,80	406.952.054,80
4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		0,00	0,00
5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.595.751,00	1.595.751,00	0,00
6. Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.493.032,00	49.115.965,72	43.086.877,90
7. Pendapatan dari Pengembalian	5.441.486.894,00	3.027.177.905,61	1.765.133.976,41
8. Pendapatan dari BLUD	45.483.292.490,47	42.764.529.616,00	44.453.130.490,00
Jumlah	52.215.123.647,47	48.781.759.644,02	50.197.155.906,45

Lain-lain PAD yang Sah dianggarkan sebesar Rp52.215.123.647,47 dan realisasi sebesar Rp48.781.759.644,02 atau 93,42%. Bila dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp50.197.155.906,45 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.415.396.262,43.

Tahun 2023 realisasi dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp507.026.441,00 atau 126,76%.

Penerimaan jasa giro terdapat realisasi sebesar Rp2.112.556.783,89 dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Jasa Giro :	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Jasa Giro pada Kas Daerah	824.748.930,00	2.090.293.874,54
2. Jasa Giro pada Kas di Bendahara	7.780.607,00	22.262.909,35
Jumlah	832.529.537,00	2.112.556.783,89

Pendapatan bunga terealisasi sebesar Rp319.757.180,80 yang bersumber dari bunga deposito dalam rangka melakukan manajemen kas dengan



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

resiko rendah sebesar Rp230.821.917,80 dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) sebesar Rp88.935.263,00.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terealisasi sebesar Rp1.595.751,00 dari anggaran sebesar Rp1.595.751,00.

Pendapatan denda pajak daerah merupakan denda yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan terealisasi sebesar Rp49.115.965,72 dari anggaran Rp14.493.032,00.

Pendapatan pengembalian belanja terealisasi sebesar Rp3.027.177.905,61 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pengembalian Belanja:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	164.223.160,00	197.043.824,00	184.831.398,00
2. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	15.905.000,00	15.905.000,00	1.580.302.578,41
3. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	96.400.000,00	1.105.960,00	0,00
4. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	64.626.750,00	67.252.400,00	0,00
5. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain, Arsitektural	50.645.600,00	50.645.600,00	0,00
6. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-, Tanah untuk Jalan	2.789.706.857,00	1.301.536.781,71	0,00
7. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	2.259.979.527,00	1.393.688.339,90	0,00
Jumlah	5.441.486.894,00	3.027.177.905,61	1.765.133.976,41

Pendapatan dari BLUD terealisasi sebesar Rp42.764.529.616,00 dengan sebagai berikut:

Penerimaan Jasa Giro :	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan dari BLUD Rumah Sakit	20.632.051.327,00	21.322.384.017,00
2. Pendapatan dari BLUD Puskesmas	24.851.241.163,47	21.442.145.599,00
Jumlah	45.483.292.490,47	42.764.529.616,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2) Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer TA 2023 sebesar Rp1.255.542.326.209,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	968.669.384.000,00	964.615.308.961,00	969.060.230.917,00
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	216.610.793.000,00	216.610.793.000,00	183.269.898.000,00
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah	94.445.084.861,00	74.316.224.248,00	86.003.786.950,00
Jumlah	1.279.725.261.861,00	1.255.542.326.209,00	1.238.333.915.867,00

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp17.208.410.342,00. Berdasarkan realisasi sebagaimana diuraikan diatas, secara rinci pendapatan dana transfer tahun 2023 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Realisasi dana perimbangan sebesar Rp964.615.308.961,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Perimbangan:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Dana Bagi Hasil	31.567.790.000,00	35.166.171.271,00	44.446.903.677,00
2. Dana Alokasi Umum	646.116.461.000,00	645.990.677.310,00	615.022.986.000,00
3. Dana Alokasi Khusus - Fisik	76.481.455.000,00	75.839.869.755,00	113.974.659.654,00
4. Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	214.503.678.000,00	207.618.590.625,00	195.615.681.586,00
Jumlah	968.669.384.000,00	964.615.308.961,00	969.060.230.917,00

Realisasi dana perimbangan tahun 2023 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Dana Bagi Hasil

Realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2023 sebesar Rp35.166.171.271,00 terdiri dari:

Dana Bagi Hasil :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.858.787.000,00	8.535.063.638,00	20.443.374.965,00
2. DBH PPh Pasal 21	5.576.065.000,00	6.105.210.761,00	5.963.605.187,00
3. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	103.579.321,00	240.682.825,00
4. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	176.442.000,00	178.416.517,00	10.320.515,00
5. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.799.548.000,00	7.456.819.873,00	9.693.563.425,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Dana Bagi Hasil :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
6. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	713.397.000,00	912.040.356,00	3.405.138.586,00
7. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	80.059.000,00	174.615.689,00	388.062.585,00
8. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	842.900.452,00
9. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	10.076.743.000,00	10.201.922.905,00	1.500.944.137,00
10. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.286.749.000,00	1.498.502.211,00	1.958.311.000,00
Jumlah	31.567.790.000,00	35.166.171.271,00	44.446.903.677,00

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi DAU untuk Kabupaten Way Kanan sebesar Rp645.990.677.310,00 dari anggaran Rp646.116.461.000,00 atau 99,98%.

(3) Dana Alokasi Khusus Fisik

Pada TA 2023 Kabupaten Way Kanan memperoleh DAK sebesar Rp75.839.869.755,00 terdiri dari:

Dana Alokasi Khusus Fisik:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	950.607.000,00	912.430.024,00	1.472.830.000,00
2. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.970.423.000,00	9.775.619.641,00	31.128.342.000,00
3. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.999.204.000,00	17.884.073.087,00	6.945.955.000,00
4. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	487.043.650,00	0,00
5. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.985.606.000,00	7.778.922.549,00	3.788.575.977,00
6. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	6.439.941.393,00
7. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	794.016.000,00	781.759.000,00	1.138.318.390,00
8. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	0,00	0,00	4.260.953.958,00
9. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	905.849.000,00	900.500.000,00	1.056.580.880,00
10. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	37.375.750.000,00	37.319.521.804,00	45.350.630.556,00
11. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	6.117.629.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Dana Alokasi Khusus Fisik:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
12. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	5.083.360.000,00
13. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	1.191.542.500,00
Jumlah	76.481.455.000,00	75.839.869.755,00	113.974.659.654,00

(4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi
 Rp207.618.590.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

DAK Non Fisik :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. DAK Non Fisik-BOS Reguler	66.419.760.000,00	66.372.371.833,00	65.737.299.664,00
2. DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.060.000.000,00	3.060.000.000,00	1.880.000.000,00
3. DAK Non Fisik-TPG PNSD	87.279.557.000,00	86.521.625.328,00	83.184.255.281,00
4. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.036.000.000,00	2.902.206.907,00	2.420.587.500,00
5. DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.645.698.000,00	2.338.954.084,00	2.720.662.716,00
6. DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.760.400.000,00	7.754.100.000,00	7.104.718.000,00
7. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.469.700.000,00	1.469.700.000,00	937.500.000,00
8. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	33.911.423.000,00	30.940.274.402,00	22.325.376.000,00
9. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	342.842.000,00	342.842.000,00	567.145.225,00
10. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	1.705.410.000,00
11. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	652.703.000,00
12. DAK Non Fisik-PK2UKM	471.370.000,00	470.880.050,00	400.800.000,00
13. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	406.900.000,00	377.976.400,00	335.844.900,00
14. DAK Non Fisik-BOKB-KB	6.518.503.000,00	4.203.249.421,00	4.733.700.100,00
15. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	128.885.200,00	601.800.000,00
16. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	742.725.000,00	735.525.000,00	307.879.200,00
Jumlah	214.503.678.000,00	207.618.590.625,00	195.615.681.586,00

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tahun 2023
 sebesar Rp216.610.793.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Dana Insentif Daerah (DID)	17.959.153.000,00	17.959.153.000,00	0,00
2. Dana Desa	198.651.640.000,00	198.651.640.000,00	183.269.898.000,00
Jumlah	216.610.793.000,00	216.610.793.000,00	183.269.898.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Selama tahun 2023 realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp74.316.224.248,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Antar Daerah :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	22.328.084.861,00	17.237.116.727,00	12.510.785.247,00
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.500.000.000,00	9.686.795.533,00	11.945.413.231,00
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.500.000.000,00	19.525.650.858,00	32.844.051.359,00
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	117.000.000,00	125.390.787,00	129.255.097,00
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	24.000.000.000,00	27.741.270.343,00	28.574.282.016,00
Jumlah	94.445.084.861,00	74.316.224.248,00	86.003.786.950,00

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Realisasi penerimaan pada tahun 2023 sebesar Rp36.696.671,00 dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan yang Sah :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Hibah	0,00	36.696.671,00	10.180.448,00
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	362.051.762,00
Jumlah	0,00	36.696.671,00	372.232.210,00

Pada Pendapatan hibah terealisasi sebesar Rp36.696.671,00 merupakan setoran dari pihak ketiga yang tidak diketahui rincian penyetorannya.

b. Belanja

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.395.535.691.960,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp1.347.023.503.692,66 atau 96,52% dengan sebagai berikut:

Belanja Daerah:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Operasi	980.112.804.842,00	948.989.894.437,86	916.159.561.718,09
2. Belanja Modal	120.746.562.353,00	107.713.480.015,54	109.116.148.013,92
3. Belanja Tidak Terduga	700.000.000,00	257.796.125,00	1.518.368.696,00
4. Belanja Transfer	293.976.324.765,00	290.062.333.114,26	271.671.871.060,05
Jumlah	1.395.535.691.960,00	1.347.023.503.692,66	1.298.465.949.488,06

Secara rinci masing-masing jenis belanja TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

1) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi secara keseluruhan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp948.989.894.437,86 dengan rincian di bawah ini:

Belanja Operasi :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	549.248.155.110,00	538.314.118.862,00	534.333.209.655,00
2. Belanja Barang dan Jasa	385.065.512.432,00	365.468.848.118,86	356.598.836.918,54
3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Hibah	45.694.137.300,00	45.101.927.457,00	24.162.015.144,55
5. Belanja Bantuan Sosial	105.000.000,00	105.000.000,00	1.065.500.000,00
Jumlah	980.112.804.842,00	948.989.894.437,86	916.159.561.718,09

Dibandingkan dengan realisasi belanja operasi pada tahun 2022 maka realisasi belanja operasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp32.830.332.719,77. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp549.248.155.110,00 dan terealisasi sebesar Rp538.314.118.862,00 atau 98,01%. Bila dibanding realisasi TA 2022 maka realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.980.909.207,00 sebagaimana pada rincian dibawah ini:

Belanja Pegawai :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	360.358.933.924,00	355.651.013.275,00	352.267.655.602,00
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.182.670.743,00	54.034.047.310,00	52.609.377.872,00
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.148.911.343,00	92.155.449.300,00	93.512.172.664,00
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.186.935.900,00	19.165.442.400,00	19.155.163.171,00
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	1.049.308.400,00	1.033.271.777,00	908.442.696,00
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	510.880.000,00
7. Belanja Pegawai BOS	15.385.114.800,00	15.385.114.800,00	15.030.917.650,00
8. Belanja Pegawai BLUD	425.400.000,00	378.900.000,00	338.600.000,00
Jumlah	549.248.155.110,00	538.314.118.862,00	534.333.209.655,00

Dari belanja pegawai dikelompokkan dalam beberapa rincian objek belanja yaitu:

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja gaji dan tunjangan Kabupaten Way Kanan selama tahun 2023 terealisasi sebesar Rp355.651.013.275,00 dengan rincian di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Gaji dan Tunjangan:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN:			
1. Belanja Gaji Pokok PNS	243.026.733.692,00	240.370.986.084,00	247.434.052.820,00
2. Belanja Gaji Pokok PPPK	27.879.417.730,00	27.781.484.000,00	18.903.952.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN:			
3. Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.079.775.539,00	22.682.602.963,00	23.265.495.550,00
4. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.808.504.852,00	2.791.334.452,00	1.878.869.246,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN:			
5. Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.150.601.046,00	6.022.463.966,00	7.405.059.000,00
6. Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN:			
7. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.871.630.480,00	18.533.816.100,00	17.719.873.000,00
8. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.158.440.200,00	3.131.973.140,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN:			
9. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.296.188.494,00	2.073.949.854,00	2.595.234.645,00
10. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.389.570,00	925.000,00	1.964.104.355,00
Belanja Tunjangan Beras ASN:			
11. Belanja Tunjangan Beras PNS	13.458.451.380,00	13.230.916.158,00	13.848.840.620,00
12. Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.045.633.838,00	2.028.032.062,00	1.377.283.560,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN:			
13. Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	291.291.295,00	228.746.655,00	235.632.668,00
14. Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN:			
15. Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.051.057,00	3.405.932,00	3.487.073,00
16. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	744.291,00	262.327,00	169.881,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN:			
17. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.859.888.844,00	13.370.975.815,00	12.678.915.342,00
18. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.157.107.016,00	1.156.289.308,00	834.781.192,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN:			
19. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	597.194.200,00	591.829.208,00	499.361.581,00
20. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Gaji dan Tunjangan:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja luran Jaminan Kematian ASN:			
21. Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.664.890.400,00	1.651.020.251,00	1.622.543.069,00
22. Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	0,00	0,00	0,00
Jumlah	360.358.933.924,00	355.651.013.275,00	352.267.655.602,00

(2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2023 terealisasi sebesar Rp54.034.047.310,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Tambahan Penghasilan ASN :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	32.607.623.564,00	31.371.101.526,00	34.096.741.165,00
2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.412.756.390,00	3.291.999.630,00	3.018.653.650,00
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	20.162.290.789,00	19.370.946.154,00	15.493.983.057,00
Jumlah	56.182.670.743,00	54.034.047.310,00	52.609.377.872,00

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp92.155.449.300,00 dengan rincian di sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	217.570.000,00	0,00	116.970.736,00
2. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	114.375.355,00	0,00	0,00
3. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	87.317.282.972,00	84.519.058.000,00	86.251.456.728,00
4. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.750.070.516,00	2.360.413.800,00	2.632.355.200,00
5. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.062.062.500,00	2.713.787.500,00	2.402.250.000,00
6. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.544.400.000,00	1.510.850.000,00	1.471.600.000,00
7. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.143.150.000,00	1.051.340.000,00	637.540.000,00
Jumlah	96.148.911.343,00	92.155.449.300,00	93.512.172.664,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp19.165.442.400,00 dengan rincian di sebagai berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	892.290.000,00
2. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	112.866.600,00	112.866.600,00	108.404.100,00
3. Belanja Tunjangan Beras DPRD	119.058.480,00	119.058.480,00	116.306.520,00
4. Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.482.000,00	76.482.000,00
5. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00
6. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	110.350.800,00	110.350.800,00	87.604.650,00
7. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	30.000.000,00	10.048.500,00	29.871.450,00
8. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000,00	3.024.000.000,00	3.024.000.000,00
9. Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000,00	756.000.000,00	756.000.000,00
10. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	205.176,00	205.176,00	210.607,00
11. Belanja Pembulatan Gaji DPRD	500.000,00	0,00	0,00
12. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	78.822.072,00	78.822.072,00	78.675.072,00
13. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.835.568,00	1.835.568,00	1.835.568,00
14. Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.506.704,00	5.506.704,00	5.506.704,00
15. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.095.698.000,00	6.094.656.000,00	6.094.656.000,00
16. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.589.500.000,00	6.589.500.000,00	6.589.500.000,00
17. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
Jumlah	19.186.935.900,00	19.165.442.400,00	19.155.163.171,00

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.033.271.777,00 dengan rincian di sebagai berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.424.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00
2. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.804.600,00	7.644.000,00	7.644.000,00
3. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.343.900,00	98.280.000,00	98.280.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
4. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.281.400,00	7.531.680,00	8.111.040,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	608.200,00	267.473,00	281.232,00
6. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.000,00	1.000,00	1.040,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000,00	5.503.680,00	4.586.400,00
8. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.100,00	102.960,00	9.360,00
9. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.200,00	346.320,00	0,00
10. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	870.280.000,00	858.994.664,00	723.400.000,00
11. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	11.529.624,00
Jumlah	1.049.308.400,00	1.033.271.777,00	908.442.696,00

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH terealisasi Rp 510.880.000,00 dengan rincian di sebagai berikut:

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	110.880.000,00
2. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
Jumlah	510.880.000,00	510.880.000,00	510.880.000,00

(7) Belanja Pegawai BOS

Belanja Pegawai BOS dianggarkan sebesar Rp15.385.114.800,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp15.385.114.800,00 atau 100,00% dengan rincian di sebagai berikut:

Belanja Pegawai BOS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pengelolaan Dana BOS Reguler SD	10.353.888.700,00	10.353.888.700,00
2. Pengelolaan Dana BOS Reguler SMP	4.862.556.100,00	4.862.556.100,00
3. Pengelolaan Dana BOS Kinerja SD	0,00	0,00
4. Pengelolaan Dana BOS Kinerja SMP	0,00	0,00
5. Pengelolaan Dana BOP PAUD	122.470.000,00	122.470.000,00
6. Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	46.200.000,00	46.200.000,00
Jumlah	15.385.114.800,00	15.385.114.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(8) Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp425.400.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp378.900.000,00 atau 89,07%. Belanja pegawai BLUD merupakan belanja pegawai pada 20 (dua puluh) puskesmas yang ada di Kabupaten Way Kanan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp385.065.512.432,00 dan terealisasi sebesar Rp365.468.848.118,86 atau 94,91%. Bila dibanding realisasi TA 2022 maka realisasi Pajak Daerah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp8.870.011.200,32 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Barang Pakai Habis	74.836.987.373,00	70.262.306.158,00	58.141.867.887,00
2. Belanja Jasa Kantor	63.581.969.768,00	59.546.548.572,00	62.013.903.538,00
3. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.014.232.114,00	12.964.788.465,00	14.894.704.683,00
4. Belanja Sewa Tanah	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00
5. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.534.486.000,00	12.180.918.199,00	10.922.552.761,00
6. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	339.100.000,00	339.000.000,00	403.000.000,00
7. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
8. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	95.000.000,00	86.000.000,00	311.491.500,00
9. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	33.311.086.256,00	32.732.334.279,48	16.416.387.050,68
10. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.237.182.650,00	6.642.715.759,00	3.343.340.803,00
11. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	40.000.000,00
12. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.650.677.500,00	8.186.759.583,00	4.020.299.586,00
13. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
14. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.082.524.600,00	3.975.596.206,00	3.889.020.749,00
15. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.351.725.588,00	12.611.412.148,02	8.079.584.919,59
16. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.419.431.813,00	10.947.471.032,87	39.371.351.980,16
17. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.409.548.193,00	42.783.394.510,00	44.307.891.542,00
18. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.342.979.000,00	2.266.438.500,00	390.931.000,00
19. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.011.795.392,00	6.671.224.825,49	10.641.974.589,91
20. Belanja Barang dan Jasa BOS	39.539.949.801,00	39.477.399.306,00	35.956.072.931,00
21. Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.191.336.384,00	43.679.040.575,00	43.406.461.398,20



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Barang dan Jasa :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Jumlah	385.065.512.432,00	365.468.848.118,86	356.598.836.918,54

Dari objek belanja barang dan jasa ini dikelompokkan dalam beberapa rincian objek belanja yaitu:

(1) Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi belanja barang pakai habis sebesar Rp70.262.306.158,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang Pakai Habis :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.238.298.447,00	2.152.434.520,00	533.999.130,00
2. Belanja Bahan-Bahan Kimia	48.734.000,00	43.442.000,00	10.153.000,00
3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	404.440.000,00	331.590.000,00	388.978.602,00
4. Belanja Bahan-Bahan Baku	939.320.730,00	933.424.600,00	15.000.000,00
5. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	347.091.000,00	343.910.000,00	244.569.000,00
6. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	71.055.000,00	70.495.000,00	70.959.000,00
7. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	164.472.000,00	163.831.227,00	137.293.000,00
8. Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.413.670.499,00	6.383.798.570,00	1.198.307.098,00
9. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	73.490.000,00	31.500.000,00	160.864.000,00
10. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	797.626.300,00	491.823.100,00	6.797.898.166,00
11. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	222.612.900,00	194.047.000,00	69.599.500,00
12. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00
13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.589.725.677,00	7.188.695.932,00	6.337.550.294,00
14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	3.080,00
15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.397.089.100,00	10.007.875.613,00	8.775.906.716,00
16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	123.040.000,00	119.054.000,00	146.869.000,00
17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	619.430.000,00	615.195.000,00	713.400.000,00
18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	344.298.132,00	329.538.500,00	46.566.500,00
19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	767.531.000,00	753.551.133,00	682.278.283,00
20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	254.548.000,00	253.448.270,00	163.406.000,00
21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	69.210.000,00	69.210.000,00	10.480.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Barang Pakai Habis :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
22. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	435.880.000,00	416.348.000,00	600.654.850,00
23. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.254.445.638,00	1.096.680.270,00	2.029.654.535,00
24. Belanja Obat-Obatan-Obat	4.304.296.000,00	4.301.644.652,00	5.636.758.939,00
25. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	291.179.200,00	271.629.200,00	197.468.280,00
26. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.326.379.000,00	8.914.470.242,00	1.065.543.900,00
27. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.948.905.750,00	3.793.876.129,00	0,00
28. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	36.456.000,00	36.456.000,00	73.500.000,00
29. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.028.070.000,00	7.144.625.030,00	13.630.607.500,00
30. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.522.850.000,00	6.497.209.150,00	5.791.240.900,00
31. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	86.700.000,00
32. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	352.795.000,00	344.839.350,00	851.579.494,00
33. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	8.428.000,00	4.928.000,00	35.528.000,00
34. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.529.350.000,00	5.175.672.500,00	11.460.000,00
35. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	40.000.000,00	39.000.000,00	34.540.000,00
36. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	590.000.000,00	590.000.000,00	389.800.000,00
37. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	183.000.000,00	177.490.800,00	26.520.000,00
38. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	25.000.000,00	24.150.000,00	19.800.000,00
39. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	282.850.000,00	216.793.820,00	212.879.000,00
40. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	289.100.000,00	277.237.650,00	15.000.000,00
41. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	32.000.000,00	30.373.600,00	65.220.000,00
42. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	10.000.000,00
43. Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	4.800.000,00
44. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	58.470.000,00	46.600.000,00	28.700.000,00
45. Belanja Pakaian KORPRI	6.900.000,00	6.299.100,00	0,00
46. Belanja Pakaian Adat Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
47. Belanja Pakaian Batik Tradisional	136.950.000,00	112.787.800,00	360.361.000,00
48. Belanja Pakaian Olahraga	218.000.000,00	216.430.400,00	431.971.120,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Barang Pakai Habis :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
49. Belanja Pakaian Paskibraka	27.500.000,00	27.400.000,00	27.500.000,00
Jumlah	74.836.987.373,00	70.262.306.158,00	58.141.867.887,00

(2) Belanja Jasa Kantor

Realisasi belanja jasa kantor sebesar Rp59.546.548.572,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja jasa kantor :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.010.600.000,00	4.111.272.500,00	3.100.045.000,00
2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	452.825.000,00	382.985.000,00	1.181.725.000,00
3. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	17.200.000,00	7.200.000,00	49.100.000,00
4. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.689.800.000,00	1.565.800.000,00	2.798.850.000,00
5. Honorarium Rohaniwan	5.850.000,00	3.750.000,00	0,00
6. Honorarium Penyelenggara Ujian	40.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	334.800.000,00	309.200.000,00	301.200.000,00
8. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.054.550.000,00	2.028.570.000,00	1.866.495.000,00
9. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.985.443.100,00	6.766.284.994,00	7.524.165.944,00
10. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	463.630.000,00	438.883.050,00	168.002.250,00
11. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	129.460.028,00	105.620.000,00	209.760.000,00
12. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.045.000.000,00	3.033.750.000,00	3.107.500.000,00
13. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	945.000.000,00	931.250.000,00	958.750.000,00
14. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	633.000.000,00	633.000.000,00	515.400.000,00
15. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00
16. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	264.000.000,00	264.000.000,00	150.000.000,00
17. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	159.000.000,00	159.000.000,00	176.000.000,00
18. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	329.400.000,00	319.500.000,00	378.600.000,00
19. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.348.237.000,00	1.348.237.000,00	1.223.763.000,00
20. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.298.000.000,00	2.240.500.000,00	2.326.850.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja jasa kantor :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
21. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	841.100.000,00	772.800.000,00	290.400.000,00
22. Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.897.248.000,00	1.828.098.000,00	1.143.800.000,00
23. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.373.600.000,00	4.333.875.584,00	4.752.000.000,00
24. Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.179.200.000,00	2.167.200.000,00	1.760.500.000,00
25. Belanja Jasa Tenaga Supir	1.228.000.000,00	1.226.000.000,00	1.279.500.000,00
26. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	135.000.000,00	130.500.000,00	13.250.000,00
27. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	60.000.000,00	20.000.000,00	87.000.000,00
28. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	47.700.000,00	45.825.000,00	30.100.000,00
29. Belanja Jasa Tata Rias	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00
30. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.676.491.160,00	4.632.874.195,00	3.173.559.550,00
31. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	113.000.000,00	97.041.300,00	10.983.000,00
32. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
33. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	150.000.000,00	149.800.000,00	0,00
34. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	380.100.000,00	328.500.000,00	576.950.000,00
35. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
36. Belanja Jasa Kalibrasi	8.400.000,00	4.807.500,00	107.298.900,00
37. Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	12.000.000,00
38. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
39. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.682.700.000,00	5.668.570.000,00	2.298.300.000,00
40. Belanja Tagihan Telepon	604.080.000,00	555.198.507,00	366.435.969,00
41. Belanja Tagihan Air	2.976.000,00	2.250.000,00	31.424.500,00
42. Belanja Tagihan Listrik	9.347.080.000,00	8.443.256.091,00	6.879.416.692,00
43. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.750.221.000,00	1.684.958.157,00	4.633.368.884,00
44. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.808.703.480,00	1.724.687.122,00	2.596.699.407,00
45. Belanja Paket/Pengiriman	29.825.000,00	20.131.300,00	8.492.550,00
46. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	234.000.000,00	199.685.708,00	272.217.892,00
47. Belanja Pengolahan Air Limbah	350.000.000,00	349.937.564,00	4.860.000.000,00
48. Belanja Medical Check Up	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00
49. Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	444.000.000,00
Jumlah	63.581.969.768,00	59.546.548.572,00	62.013.903.538,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi belanja iuran jaminan/ asuransi sebesar
 Rp12.964.788.465,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja iuran jaminan/ asuransi :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.416.940,00	3.075.300,00	0,00
2. Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	12.258.856.259,00	12.227.000.600,00	14.349.393.800,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	287.758.875,00	280.046.713,00	236.273.243,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	45.822.240,00	45.813.120,00	35.721.118,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	57.277.800,00	57.266.400,00	44.651.402,00
6. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	361.100.000,00	351.586.332,00	228.665.120,00
Jumlah	13.014.232.114,00	12.964.788.465,00	14.894.704.683,00

(4) Belanja Sewa Tanah

Realisasi belanja sewa tanah sebesar Rp67.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja sewa peralatan dan mesin :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
2. Belanja Sewa Tanah Perkebunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Jumlah	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja sewa peralatan dan mesin sebesar
 Rp12.180.918.199,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja sewa peralatan dan mesin :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.444.920.000,00	1.387.858.078,00	7.750.062.411,00
2. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.638.950.000,00	8.440.966.121,00	1.379.743.050,00
3. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	42.000.000,00	40.300.000,00	0,00
4. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.382.586.000,00	2.287.264.000,00	1.545.435.700,00
5. Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	88.391.600,00
6. Belanja Sewa Alat Dapur	6.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
7. Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	30.000,00	30.000,00	0,00
8. Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	122.920.000,00
9. Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	30.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja sewa peralatan dan mesin :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
10. Belanja Sewa Peralatan Komputer			0,00
Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	
Jumlah	12.534.486.000,00	12.180.918.199,00	10.922.552.761,00

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja sewa gedung dan bangunan sebesar
 Rp339.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja sewa gedung dan bangunan :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	40.000.000,00	39.900.000,00	40.000.000,00
2. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	49.800.000,00	49.800.000,00	150.300.000,00
3. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	29.400.000,00	29.400.000,00	28.700.000,00
4. Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	26.500.000,00
5. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	30.000.000,00
6. Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00
7. Belanja Sewa Hotel	138.000.000,00	138.000.000,00	127.500.000,00
8. Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Jumlah	339.100.000,00	339.000.000,00	403.000.000,00

(7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar
 Rp95.000.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
 terealisasi Rp86.000.000,00 atau 90,53%.

(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar
 Rp32.732.334.279,48 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja jasa konsultansi konstruksi :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	399.525.608,00	398.559.486,00	440.188.038,00
2. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	291.000.000,00
3. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	32.590.000,00	32.561.500,00	99.781.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja jasa konsultasi konstruksi :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
4. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	4.339.692.689,00	4.313.442.950,00	3.447.621.129,00
5. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	4.334.592.623,00	4.317.755.759,00	1.709.328.790,00
6. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	13.224.960.662,00	13.148.416.405,00	5.557.436.070,00
7. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	2.547.766.733,00	2.546.766.732,48	599.999.622,00
8. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	3.927.315.425,00	3.791.829.547,00	703.552.090,00
9. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	249.996.198,00
10. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	135.950.000,00	135.888.900,00	0,00
11. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	380.000.000,00	376.999.512,00	198.938.418,00
12. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.643.692.516,00	3.327.010.127,00	2.628.084.790,68
13. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	345.000.000,00	343.103.361,00	482.460.905,00
14. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	8.000.000,00
Jumlah	33.311.086.256,00	32.732.334.279,48	16.416.387.050,68

(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi belanja jasa non konstruksi sebesar Rp6.642.715.759,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja jasa non konstruksi :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	14.500.000,00	14.474.733,00	14.500.000,00
2. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	5.362.682.650,00	5.148.799.575,00	0,00
3. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	195.000.000,00	193.865.829,00	149.189.550,00
4. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	650.000.000,00	629.968.956,00	1.712.177.553,00
5. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.015.000.000,00	655.606.666,00	1.467.473.700,00
Jumlah	7.237.182.650,00	6.642.715.759,00	3.343.340.803,00

(10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.186.759.583,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.578.242.500,00	6.161.756.683,00	3.895.584.586,00
2. Belanja Sosialisasi	1.876.260.000,00	1.834.477.900,00	39.500.000,00
3. Belanja Bimbingan Teknis	14.450.000,00	8.800.000,00	13.020.000,00
4. Belanja Diklat Kepemimpinan	181.725.000,00	181.725.000,00	72.195.000,00
Jumlah	8.650.677.500,00	8.186.759.583,00	4.020.299.586,00

(11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp48.000.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp48.000.000,00 atau 100,00%.

(12) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp3.975.596.206,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	0,00	0,00	38.133.000,00
2. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	2.835.000.000,00	2.769.803.800,00	2.832.493.949,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bermotor-Kendaraan Dinas			
Bermotor Perorangan			
3. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	90.000.000,00	89.999.696,00	60.000.000,00
4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	42.760.000,00
5. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	250.000,00
6. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	8.990.000,00	6.000.000,00
7. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	504.800.000,00	497.714.900,00	364.839.600,00
8. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	108.000.000,00	108.000.000,00	102.000.000,00
9. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	158.200.000,00	148.749.210,00	118.923.500,00
10. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	35.500.000,00
11. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	40.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00
12. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	97.921.500,00
13. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	175.000.000,00	165.814.000,00	0,00
14. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	41.300.000,00
15. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	43.300.000,00	32.800.000,00	0,00
16. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	86.624.600,00	81.124.600,00	98.299.200,00
17. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
18. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah	4.082.524.600,00	3.975.596.206,00	3.889.020.749,00

(13) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp12.611.412.148,02 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	4.811.110.632,00	4.545.996.000,02	6.769.048.086,59
2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	0,00	0,00	9.281.250,00
3. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	204.989.956,00	194.834.470,00	94.809.161,00
4. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	502.553.422,00
5. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan, Penampung Sekam	8.267.125.000,00	7.804.581.678,00	
6. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan, Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00
7. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	703.893.000,00
8. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah, Negara Golongan III	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
Jumlah	13.351.725.588,00	12.611.412.148,02	8.079.584.919,59

(14) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp10.947.471.032,87 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	9.460.087.663,00	9.088.073.674,87	38.862.728.007,16
2. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan, Kabupaten	500.000.000,00	474.210.658,00	0,00
3. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.356.844.150,00	1.288.282.050,00	447.898.723,00
4. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	102.500.000,00	96.904.650,00	60.725.250,00
Jumlah	11.419.431.813,00	10.947.471.032,87	39.371.351.980,16

(15) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Realisasi perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp42.783.394.510,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja perjalanan dinas dalam negeri :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.087.081.300,00	17.073.411.465,00	18.137.930.911,00
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.723.441.893,00	23.238.443.045,00	25.966.560.631,00
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.323.165.000,00	1.293.000.000,00	0,00
	1.275.860.000,00	1.178.540.000,00	203.400.000,00
Jumlah	46.409.548.193,00	42.783.394.510,00	44.307.891.542,00

(16) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.266.438.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	222.679.000,00	220.063.500,00	14.021.000,00
2. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.086.000.000,00	1.039.375.000,00	29.500.000,00
3. Belanja Beasiswa	899.500.000,00	892.000.000,00	316.000.000,00
4. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	19.800.000,00	0,00	1.410.000,00
5. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00
6. Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Jumlah	2.342.979.000,00	2.266.438.500,00	390.931.000,00

(17) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp6.671.224.825,49 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.846.872.450,00	3.630.240.584,00	1.946.645.130,00
2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.164.922.942,00	3.040.984.241,49	8.695.329.459,91
Jumlah	7.011.795.392,00	6.671.224.825,49	10.641.974.589,91

(18) Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan sebesar Rp39.539.949.801,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp39.477.399.306,00 atau 99,84% dengan rincian di sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa BOS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pengelolaan Dana BOS Reguler SD	26.848.630.801,00	26.787.379.706,00
2. Pengelolaan Dana BOS Reguler SMP	10.094.237.600,00	10.092.938.200,00
3. Pengelolaan Dana BOS Kinerja SD	1.324.223.700,00	1.324.223.700,00
4. Pengelolaan Dana BOS Kinerja SMP	863.997.700,00	863.997.700,00
5. Pengelolaan Dana BOP Kinerja PAUD	60.000.000,00	60.000.000,00
6. Pengelolaan Dana BOP Reguler PAUD	167.020.000,00	167.020.000,00
7. Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	136.840.000,00	136.840.000,00
8. Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00
Jumlah	39.539.949.801,00	39.477.399.306,00

(19) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp47.191.336.384,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp43.679.040.575,00 atau 92,56% dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Barang dan Jasa RSUD ZA Pagar Alam	22.800.000.000,00	22.679.118.585,00
2. Belanja Barang dan Jasa Puskesmas	24.391.336.384,00	20.999.921.990,00
Jumlah	47.191.336.384,00	43.679.040.575,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

c) Belanja Bunga

Tahun 2023 Kabupaten Way Kanan tidak ada belanja bunga.

d) Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 45.694.137.300,00 dan realisasi sebesar Rp45.101.927.457,00 dengan rincian di bawah ini:

Belanja Hibah:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	16.396.924.800,00	16.396.924.800,00	1.600.000.000,00
2. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.297.692.700,00	4.181.884.800,00	1.847.560.601,55
3. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	1.000.000.000,00
4. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	56.450.000,00
5. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.104.326.000,00	18.884.414.057,00	17.553.298.743,00
6. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	280.780.000,00
7. Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	100.000.000,00
8. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.168.580.000,00	1.168.580.000,00	418.562.000,00
9. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	29.650.000,00
10. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.516.200.000,00	1.311.500.000,00	344.500.000,00
11. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.473.320.000,00	1.472.400.000,00	0,00
12. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	320.000.000,00	300.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Hibah:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
13. Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	485.880.000,00	455.010.000,00	0,00
14. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	931.213.800,00	931.213.800,00	931.213.800,00
Jumlah	45.694.137.300,00	45.101.927.457,00	24.162.015.144,55

Belanja Hibah dengan rincian OPD sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	650.000.000,00	650.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.746.924.800,00	15.746.924.800,00
2. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat		
Dinas Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten	3.247.692.700,00	3.131.884.800,00
3. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.899.326.000,00	16.729.414.057,00
Dinas Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	50.000.000,00	750.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	100.000.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten	450.000.000,00	400.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	855.000.000,00	855.000.000,00
4. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	425.000.000,00	425.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000,00	250.000.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten	493.580.000,00	493.580.000,00
5. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	186.200.000,00	34.000.000,00
Dinas Sosial	35.000.000,00	35.000.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten	1.295.000.000,00	1.242.500.000,00
6. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.423.320.000,00	1.423.000.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten	50.000.000,00	49.400.000,00
7. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300.000.000,00	300.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	20.000.000,00	0,00
8. Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	434.480.000,00	433.910.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten	51.400.000,00	21.100.000,00
9. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	931.213.800,00	931.213.800,00
Jumlah	45.694.137.300,00	45.101.927.457,00

e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp105.000.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp105.000.000,00 dengan rincian di bawah ini :

Belanja Bantuan Sosial:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	105.000.000,00	105.000.000,00	1.065.500.000,00
Jumlah	105.000.000,00	105.000.000,00	1.065.500.000,00

2) Belanja Modal

Realisasi belanja modal secara keseluruhan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp107.713.480.015,54 dengan rincian di bawah ini:

Belanja Modal :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2. Belanja Peralatan dan Mesin	31.716.490.369,00	31.144.997.407,00	55.318.050.599,00
3. Belanja Gedung dan Bangunan	19.361.344.460,00	18.301.118.891,52	11.822.755.924,32
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.591.185.474,00	57.105.656.092,02	40.047.446.424,60
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	659.660.000,00	522.297.125,00	1.184.378.366,00
6. Belanja Aset Lainnya	2.417.882.050,00	639.410.500,00	743.516.700,00
Jumlah	120.746.562.353,00	107.713.480.015,54	109.116.148.013,92

a) Belanja Modal Tanah

Pada tahun 2023 tidak ada realisasi belanja modal tanah.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp31.716.490.369,00 dan terealisasi sebesar Rp31.144.997.407,00 atau 98,20%. Bila dibanding realisasi TA 2022 maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp24.173.053.192,00 sebagaimana terlihat pada rincian dibawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Modal Peralatan dan Mesin:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Alat Bantu	20.000.000,00	0,00	158.782.000,00
2. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	1.494.599.478,00
3. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	750.000,00	0,00	0,00
4. Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	19.000.000,00
5. Belanja Modal Alat Kantor	1.831.304.959,00	1.714.530.100,00	806.696.492,00
6. Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.677.185.000,00	9.495.977.450,00	2.222.786.900,00
7. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	320.321.000,00	309.952.500,00	295.697.100,00
8. Belanja Modal Alat Studio	128.937.200,00	108.890.000,00	626.589.000,00
9. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	14.000.000,00	13.700.000,00	0,00
10. Belanja Modal Alat Kedokteran	5.732.054.000,00	5.727.105.647,00	2.511.681.264,00
11. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	1.925.000.000,00
12. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.666.201.350,00	1.651.050.000,00	30.448.159.996,00
13. Belanja Modal Komputer Unit	2.693.878.500,00	2.561.217.000,00	2.049.412.240,00
14. Belanja Modal Peralatan Komputer	679.893.000,00	613.019.000,00	835.042.350,00
15. Belanja Modal Sumur	17.101.181,00	17.101.181,00	324.922.447,00
16. Belanja Modal Alat Pelindung	12.000.000,00	11.795.000,00	0,00
17. Belanja Modal Alat SAR	207.750.000,00	206.720.000,00	0,00
18. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	70.000.000,00	69.900.000,00	100.500.000,00
19. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	29.586.000,00	28.511.350,00	187.653.200,00
20. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.615.528.179,00	8.615.528.179,00	11.311.528.132,00
Jumlah	31.716.490.369,00	31.144.997.407,00	55.318.050.599,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Modal Alat Bantu

Pada tahun 2023 anggaran Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp20.000.000,00 dan tidak ada realisasi.

(2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin

Pada tahun 2023 anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp750.000,00 dan tidak ada realisasi.

(3) Belanja Modal Alat Kantor

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp1.714.530.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Alat Kantor:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Mesin Ketik	10.000.000,00	2.350.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Modal Alat Kantor:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
2. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	18.400.000,00
3. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.821.304.959,00	1.712.180.100,00	788.296.492,00
Jumlah	1.831.304.959,00	1.714.530.100,00	806.696.492,00

(4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Realisasi belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp9.495.977.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Alat Rumah Tangga:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Mebel	5.420.260.000,00	5.413.900.000,00	16.294.000,00
2. Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	13.732.650,00
3. Belanja Modal Alat Pendingin	536.798.000,00	463.950.450,00	622.977.450,00
4. Belanja Modal Alat Dapur	69.720.000,00	65.128.000,00	4.310.000,00
5. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.633.280.000,00	3.552.999.000,00	1.555.482.800,00
6. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	17.127.000,00	0,00	9.990.000,00
Jumlah	9.677.185.000,00	9.495.977.450,00	2.222.786.900,00

(5) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Realisasi belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp309.952.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	84.796.000,00	83.396.000,00	10.750.000,00
2. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	154.060.000,00	151.898.500,00	0,00
3. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	48.534.100,00
4. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	61.435.000,00	60.922.000,00	15.950.000,00
5. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	13.950.000,00	13.736.000,00	0,00
6. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	6.080.000,00	0,00	102.960.000,00
7. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	117.503.000,00
Jumlah	320.321.000,00	309.952.500,00	295.697.100,00

(6) Belanja Modal Alat Studio

Realisasi belanja modal alat studio sebesar Rp108.890.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Modal Alat Studio:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	40.199.000,00	20.190.000,00	386.835.000,00
2. Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	76.611.200,00	76.580.000,00	71.800.000,00
3. Belanja Modal Alat Studio Lainnya	12.127.000,00	12.120.000,00	167.954.000,00
Jumlah	128.937.200,00	108.890.000,00	626.589.000,00

(7) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum dianggarkan sebesar Rp14.000.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp13.700.000,00 atau 97,86%.

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran

Realisasi belanja modal alat kedokteran sebesar Rp5.727.105.647,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Alat Kedokteran:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)
1. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.732.054.000,00	5.727.105.647,00	1.056.580.880,00
2. Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	15.000.000,00
3. Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	1.440.100.384,00
Jumlah	5.732.054.000,00	5.727.105.647,00	2.511.681.264,00

(9) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah dianggarkan sebesar Rp 1.666.201.350,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp 1.651.050.000,00 atau 99,09%.

(10) Belanja Modal Komputer Unit

Realisasi belanja modal komputer unit sebesar Rp2.561.217.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Komputer Unit:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	30.590.800,00
2. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.693.878.500,00	2.561.217.000,00	2.018.821.440,00
Jumlah	2.693.878.500,00	2.561.217.000,00	2.049.412.240,00

(11) Belanja Modal Peralatan Komputer

Realisasi belanja modal peralatan komputer sebesar Rp613.019.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Modal Peralatan Komputer:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	20.350.000,00
2. Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	119.950.000,00
3. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	679.893.000,00	613.019.000,00	694.742.350,00
Jumlah	679.893.000,00	613.019.000,00	835.042.350,00

(12) Belanja Modal Sumur

Belanja Modal Sumur dianggarkan sebesar Rp 17.101.181,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp17.101.181,00 atau 100,00%.

(13) Belanja Modal Alat Pelindung

Belanja Modal Alat Pelindung dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp11.795.000,00 atau 98,29%.

(14) Belanja Modal Alat SAR

Belanja Modal Alat SAR dianggarkan sebesar Rp 207.750.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp206.720.000,00 atau 99,50%.

(15) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan

Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp69.900.000,00 atau 99,50%.

(16) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Realisasi belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp28.511.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	103.937.600,00
2. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	29.586.000,00	28.511.350,00	83.715.600,00
Jumlah	29.586.000,00	28.511.350,00	187.653.200,00

(17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp 8.615.528.179,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi Rp 8.615.528.179,00 atau 100,00% dengan rincian di sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa BOS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pengelolaan Dana BOS Reguler SD	6.120.293.279,00	6.120.293.279,00
2. Pengelolaan Dana BOS Reguler SMP	1.843.486.300,00	1.843.486.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Barang dan Jasa BOS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3. Pengelolaan Dana BOS Kinerja SD	398.276.300,00	398.276.300,00
4. Pengelolaan Dana BOS Kinerja SMP	196.002.300,00	196.002.300,00
5. Pengelolaan Dana BOP PAUD	35.110.000,00	35.110.000,00
6. Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	22.360.000,00	22.360.000,00
Jumlah	8.615.528.179,00	8.615.528.179,00

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp19.361.344.460,00 dan terealisasi sebesar Rp18.301.118.891,52 atau 94,52%. Bila dibanding realisasi TA 2022 maka realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp6.478.362.967,20 sebagaimana terlihat pada rincian dibawah ini:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	448.913.261,00	428.586.058,52	1.001.407.512,00
2. Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.694.654.000,00	3.500.604.962,00	185.184.900,00
3. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	9.986.099,00	9.986.099,00	189.735.885,32
4. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.207.791.100,00	14.361.941.772,00	9.555.387.271,00
5. Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	494.962.050,00
6. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	239.878.306,00
7. Belanja Modal Taman	0,00	0,00	73.700.000,00
8. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	82.500.000,00
Jumlah	19.361.344.460,00	18.301.118.891,52	11.822.755.924,32

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp66.591.185.474,00 dan terealisasi sebesar Rp57.105.656.092,02 atau 85,76%. Bila dibanding realisasi TA 2022 maka realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp17.058.209.667,42 sebagaimana terlihat pada rincian dibawah ini:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Jalan Kabupaten	62.444.790.289,00	53.169.299.908,34	34.682.313.332,41
2. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.382.393.235,00	1.320.065.683,68	3.880.643.167,19
3. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.207.466.550,00	1.146.156.500,00	271.549.381,00
4. Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.544.875.400,00	1.467.584.000,00	914.444.894,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00	199.800.000,00
6. Belanja Modal Jaringan Distribusi	11.660.000,00	2.550.000,00	98.695.650,00
Jumlah	66.591.185.474,00	57.105.656.092,02	40.047.446.424,60

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp659.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp522.297.125,00 atau 79,18%. Bila dibanding realisasi TA 2022 maka realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp662.081.241,00 sebagaimana terlihat pada rincian dibawah ini:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Alat Musik	9.660.000,00	0,00	0,00
2. Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	100.000.000,00	0,00	0,00
3. Belanja Modal Software	50.000.000,00	49.948.613,00	348.455.000,00
4. Belanja Modal Kajian	500.000.000,00	472.348.512,00	0,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD (RSUD)	0,00	0,00	835.923.366,00
Jumlah	659.660.000,00	522.297.125,00	1.184.378.366,00

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp 2.417.882.050,00 dan terealisasi sebesar Rp 639.410.500,00 atau 26,45%. Belanja modal aset lainnya merupakan belanja modal BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Aset Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja RSUD ZA Pagar Alam	1.200.000.000,00	90.568.000,00
2. Belanja Puskesmas	1.217.882.050,00	548.842.500,00
Jumlah	2.417.882.050,00	639.410.500,00

3) Belanja Tak Terduga

Pada tahun 2022 belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp257.796.125,00. Rincian realisasi belanja tak terduga sebagai berikut:

1. Biaya Operasional dan Jasa Pembongkaran dan Pengeluaran Barang Hibah dari Pelabuhan Tanjung Priok.	106.775.000,00
2. Biaya Penanganan Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.	78.021.125,00
3. Biaya Perbaikan Rumah dan Bangunan Akibat Musibah Kebakaran di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.	38.500.000,00
4. Biaya Perbaikan Atap Rumah, Atap Tribun Lapangan dan Akibat Musibah Angin Puting Beliu dan Angin Kencang di Kabupaten Way Kanan	34.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Jumlah **257.796.125,00**

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer tahun 2023 direncanakan sebesar Rp293.976.324.765,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp290.062.333.114,26 atau 98,67% dengan rincian sebagai berikut:

Transfer :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.200.000.000,00	1.319.999.850,00	1.990.121.500,00
2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	300.000.000,00	0,00	452.502.350,00
3. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	972.184.765,00	972.184.764,26	395.414.130,05
4. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	290.504.140.000,00	287.770.148.500,00	268.833.833.080,00
Jumlah	293.976.324.765,00	290.062.333.114,26	271.671.871.060,05

Berdasarkan data di atas, belanja bantuan keuangan kepada desa terealisasi sebesar Rp287.770.148.500,00 atau 99,06% dari anggaran sebesar Rp290.504.140.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa:	2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Alokasi Dana Desa	198.651.640.000,00	198.651.640.000,00
2. Alokasi Dana Kampung	91.380.300.000,00	88.763.308.500,00
3. TPAPK (Insentif Aparat Pemerintah Kelurahan)	472.200.000,00	355.200.000,00
Jumlah	290.504.140.000,00	287.770.148.500,00

Realisasi penyerapan Dana Desa sebesar Rp198.651.640.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Penyerapan Dana Desa TA 2023 :

1. Pendapatan	198.651.640.000,00
2. Silpa tahun lalu	4.058.365.336,00
3. Belanja	
- Bidang Pemerintahan	43.711.166.972,00
- Bidang Pembangunan	94.516.834.919,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	14.442.419.503,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14.733.506.134,00
- Bidang Tak Terduga	29.404.475.800,00
Jumlah Belanja	196.808.403.328,00
Saldo (1+2-3)	5.901.602.008,00

Realisasi penyerapan dana desa secara rinci pada Lampiran 21.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

c. Surplus/Defisit

Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.335.032.575.065,75 dan realisasi Belanja sebesar Rp1.347.023.503.692,66 sehingga terjadi defisit sebesar Rp11.990.928.626,91. Realisasi defisit lebih kecil dari yang diperkirakan yaitu sebesar Rp22.414.398.893,62. Hal tersebut lebih disebabkan karena adanya margin kontribusi antara total Pendapatan daerah 98,08% sementara total Belanja terealisasi sebesar 96,52%.

d. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan daerah untuk periode tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Pembiayaan Daerah :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	37.205.327.520,53	36.435.831.470,53	22.222.549.390,15
2. Pengeluaran Pembiayaan	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah	34.405.327.520,53	33.635.831.470,53	19.722.549.390,15

Realisasi masing-masing jenis pembiayaan tahun anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp36.435.831.470,53 dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan:	2022		2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Penggunaan SiLPA	37.205.327.520,53	36.435.831.470,53	22.222.549.390,15
2. Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Jumlah	37.205.327.520,53	36.435.831.470,53	22.222.549.390,15

2) Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp2.800.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pengeluaran Pembiayaan:	2022		2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Penyertaan Modal pada BUMD	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	2.500.000.000,00
2. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	2.500.000.000,00

Pengeluaran penyertaan modal pada tahun 2023 merupakan penambahan penyertaan modal pada Bank Lampung sebesar Rp2.000.000.000,00 dan PT BPR Syariah Way Kanan sebesar Rp800.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

3) Pembiayaan Netto

Dari uraian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan di atas, maka diperoleh pembiayaan netto atas realisasi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp33.635.831.470,53 yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

e. SiLPA

Realisasi Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.644.902.843,62 dengan perhitungan sebagai berikut:

S

1. Jumlah Pendapatan	Rp.	1.335.032.575.065,75
2. Jumlah Belanja dan Transfer	Rp.	1.347.023.503.692,66
3. Surplus (1-2)	Rp.	(11.990.928.626,91)
4. Pembiayaan - Penerimaan Daerah	Rp.	36.435.831.470,53
5. Pembiayaan - Pengeluaran Daerah	Rp.	2.800.000.000,00
6. Pembiayaan Daerah Netto (4-5)	Rp.	33.635.831.470,53
7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (3+6)	Rp.	21.644.902.843,62

Pada Silpa TA 2023 terdapat saldo DAK Fisik sebesar Rp3.296.452.952,95, DAK Non Fisik sebesar Rp3.164.899.839,00, DAU DBH Sawit sebesar Rp7.144.467.000,00 dan terdapat temuan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah SDN dan SMPN yang disetor ke kasda sebesar Rp1.393.688.339,90.

6.2 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Struktur LO mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.165.333.815.030,93 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan-LO:	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah-LO	75.112.070.179,93
2. Pendapatan Transfer – LO	1.083.144.677.841,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	7.077.067.010,00
Jumlah	1.165.333.815.030,93

Dari tabel di atas pendapatan LO dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengakuan pendapatan LO dapat ditelusuri dengan cara realisasi penerimaan kas atas masing-masing rekening pendapatan di tambah piutang tahun berkenaan di kurangi realisasi pendapatan dari piutang tahun lalu.

Rincian pendapatan operasional berdasarkan pengelompokannya adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

1) Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp75.112.070.179,93 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah-LO:	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan Pajak-LO	22.546.692.721,64
2. Pendapatan Retribusi – LO	2.268.744.950,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.695.471.831,59
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	46.601.160.676,70
Jumlah	75.112.070.179,93

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak - LO

Pendapatan Pajak-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.546.692.721,64 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak – LO:	Penerimaan (Rp)	Realisasi Piutang (Rp)	Piutang Tahun Berkenaan (Rp)	Pendapatan – LO (Rp)
1. Pajak Hotel	23.809.490,00	0,00	0,00	23.809.490,00
2. Pajak Restoran	2.171.527.134,00	0,00	0,00	2.171.527.134,00
3. Pajak Reklame	206.629.845,00	0,00	0,00	206.629.845,00
4. Pajak Penerangan Jalan	10.751.475.919,60	0,00	0,00	10.751.475.919,60
5. Pajak Parkir	120.625.705,00	0,00	0,00	120.625.705,00
6. Pajak Air Tanah	640.255.739,10	(2.064.058,00)	774.992,00	638.966.673,10
7. Pajak BPHTB	579.632.675,00	0,00	0,00	579.632.675,00
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.728.388.981,44	(880.532.361,50)	555.130.658,00	7.402.987.277,94
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	651.038.002,00	0,00	0,00	651.038.002,00
Jumlah	22.873.383.491,14	(882.596.419,50)	555.905.650,00	22.546.692.721,64

b) Pendapatan Retribusi - LO

Pendapatan Retribusi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.268.744.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi – LO:	Penerimaan (Rp)	Realisasi Piutang (Rp)	Piutang Tahun Berkenaan (Rp)	Pendapatan – LO (Rp)
1. Retribusi Jasa Umum	957.562.177,00	(42.851.070,00)	0,00	914.711.107,00
2. Retribusi Jasa Usaha	711.982.370,00	(11.400.000,00)	0,00	700.582.370,00
3. Retribusi Perizinan Tertentu	749.718.123,00	(96.266.650,00)	0,00	653.451.473,00
Jumlah	2.419.262.670,00	(150.517.720,00)	0,00	2.268.744.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.695.471.831,59 dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Penerimaan (Rp)	Penerimaan Tidak Masuk LO	Pendapatan – LO (Rp)
1. BUMD (PT. Bank Lampung)	3.695.471.831,59	0,00	3.695.471.831,59
2. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	1.683.674.549,00	(1.683.674.549,00)	0,00
Jumlah	5.379.146.380,59	(1.683.674.549,00)	3.695.471.831,59

Penerimaan dividen dari PT BPRS sebesar Rp1.683.674.549,00 bukan merupakan pendapatan operasional. Berdasarkan metode ekuitas, dalam pencatatan penyertaan modal pemerintah daerah, penerimaan dividen akan mengurangi nilai penyertaan modal pemerintah daerah sehingga tidak dicatat sebagai pendapatan-LO.

d) Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Asli daerah Lainnya - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp46.601.160.676,70 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO :	Penerimaan (Rp)	Realisasi Piutang (Rp)	Piutang Tahun Berkenaan (Rp)	Pendapatan – LO (Rp)
1. Penerimaan Jasa Giro	2.112.556.783,89	0,00	0,00	2.112.556.783,89
2. Pendapatan Bunga	319.757.180,80	(875.926,32)	0,00	318.881.254,48
3. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.595.751,00	0,00	0,00	1.595.751,00
5. Pendapatan Denda Pajak Daerah	49.115.965,72	0,00	0,00	49.115.965,72
6. Pendapatan dari Pengembalian	3.027.177.905,61	0,00	0,00	3.027.177.905,61
7. Pendapatan dari BLUD	42.764.529.616,00	(1.816.912.600,00)	144.216.000,00	41.091.833.016,00
Jumlah	48.274.733.203,02	(1.817.788.526,32)	144.216.000,00	46.601.160.676,70

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.083.144.677.841,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer:	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	965.211.403.805,00
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	17.959.153.000,00
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.974.121.036,00
Jumlah	1.083.144.677.841,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO

Hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp965.211.403.805,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan:	Penerimaan (Rp)	Realisasi Piutang, Koreksi (Rp)	Piutang Tahun Berkenaan (Rp)	Pendapatan – LO (Rp)
1. Dana Bagi Hasil	35.166.171.271,00	(3.611.614.421,00)	4.207.709.265,00	35.762.266.115,00
2. Dana Alokasi Umum	645.990.677.310,00	0,00	0,00	645.990.677.310,00
3. Dana Alokasi Khusus - Fisik	75.839.869.755,00	0,00	0,00	75.839.869.755,00
4. Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	207.618.590.625,00	0,00	0,00	207.618.590.625,00
Jumlah	964.615.308.961,00	(3.611.614.421,00)	4.207.709.265,00	965.211.403.805,00

b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO

Hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp17.959.153.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya:	Penerimaan (Rp)	Penerimaan tidak masuk LO (Rp)	Pendapatan – LO (Rp)
1. Dana Insentif Daerah (DID)	17.959.153.000,00	0,00	17.959.153.000,00
2. Dana Desa	198.651.640.000,00	(198.651.640.000,00)	0,00
Jumlah	216.610.793.000,00	(198.651.640.000,00)	17.959.153.000,00

Pendapatan LO atas Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya diperuntukan untuk pembiayaan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Untuk penerimaan dana desa sebesar Rp198.651.640.000,00 tidak masuk ke dalam Laporan Operasional Kabupaten Way Kanan karena merupakan aktivitas transitoris.

c) Transfer Antar Daerah

Hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp99.974.121.036,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Provinsi:	Penerimaan (Rp)	Realisasi Piutang (Rp)	Piutang Tahun Berkenaan (Rp)	Pendapatan – LO (Rp)
1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.237.116.727,00	(12.983.210.822,00)	14.727.509.182,00	18.981.415.087,00
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.686.795.533,00	(6.297.490.504,00)	8.633.078.202,00	12.022.383.231,00
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.525.650.858,00	(19.525.650.858,00)	41.515.268.674,00	41.515.268.674,00
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	125.390.787,00	(77.813.661,00)	195.268.857,00	242.845.983,00
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	27.741.270.343,00	(5.295.739.277,00)	4.766.676.995,00	27.212.208.061,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Transfer Pemerintah Provinsi:	Penerimaan (Rp)	Realisasi Piutang (Rp)	Piutang Tahun Berkenaan (Rp)	Pendapatan – LO (Rp)
Jumlah	74.316.224.248,00	(44.179.905.122,00)	69.837.801.910,00	99.974.121.036,00

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hasil Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.077.067.010,00 dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:	Penerimaan (Rp)	Realisasi Piutang (Rp)	Penerimaan tidak melalui Kasda (Rp)	Pendapatan – LO (Rp)
1. Pendapatan Hibah	36.696.671,00	0,00	7.040.370.339,00	7.077.067.010,00
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	36.696.671,00	0,00	7.040.370.339,00	7.077.067.010,00

Selain penerimaan secara tunai, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga menerima hibah tidak melalui Kas Daerah sebesar Rp7.040.370.339,00 dengan rincian sebagai berikut:

Hibah tidak melalui Kas Daerah:	Jumlah (Rp)
1. Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.237.996.500,00
2. Hibah pada Dinas Kesehatan Gudang Farmasi	5.788.311.789,00
3. Hibah pada Dinas Kesehatan dari Kemendagri	14.062.050,00
Jumlah	7.040.370.339,00

b. Beban

Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.199.192.072.250,35 dengan rincian sebagai berikut:

Beban:	Jumlah (Rp)
1. Beban Operasi	914.420.223.038,24
2. Beban Penyisihan Piutang	576.606.738,85
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi	193.909.530.539,00
4. Beban Transfer	90.285.711.934,26
5. Beban Tak Terduga	0,00
Jumlah Beban Operasional	1.199.192.072.250,35

Rincian Beban Operasional berdasarkan pengelompokannya adalah sebagai berikut:

1) Beban Operasi

Beban Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp914.420.223.038,24 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Beban Operasi :	Jumlah (Rp)
1. Beban Pegawai	539.878.848.900,00
2. Beban Barang dan Jasa	315.729.644.866,24
3. Beban Bunga	0,00
4. Beban Hibah	58.706.729.272,00
5. Beban Bantuan Sosial	105.000.000,00
Jumlah	914.420.223.038,24

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp539.878.848.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai:	Pengeluaran (Rp)	Pembayaran utang belanja tahun lalu (Rp)	Pengakuan utang belanja (Rp)	Beban – LO	(Rp)
1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN	355.651.013.275,00	(2.983.229.172,00)	4.729.360.112,00	357.397.144.215,00	
2. Beban Tambahan Penghasilan ASN	54.186.947.310,00	(8.338.986.256,00)	8.157.585.354,00	54.005.546.408,00	
3. Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00		0,00
4. Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00		0,00
5. Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	84.519.058.000,00	0,00	0,00	84.519.058.000,00	
6. Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.360.413.800,00	0,00	0,00	2.360.413.800,00	
7. Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.713.787.500,00	0,00	0,00	2.713.787.500,00	
8. Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.510.850.000,00	0,00	0,00	1.510.850.000,00	
10. Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.277.340.000,00	0,00	0,00	1.277.340.000,00	
11. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.165.442.400,00	0,00	0,00	19.165.442.400,00	
12. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.033.271.777,00	0,00	0,00	1.033.271.777,00	
13. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	0,00	0,00	510.880.000,00	
14. Belanja Pegawai BOS	15.385.114.800,00	0,00	0,00	15.385.114.800,00	
15. Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00		0,00
Jumlah	538.314.118.862,00	(11.322.215.428,00)	12.886.945.466,00	539.878.848.900,00	



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

b) Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp315.729.644.866,24 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa:	Pengeluaran (Rp)	Pembayaran utang belanja dan reklasifikasi beban (Rp)	Pengakuan utang belanja dan reklasifikasi aset tetap (Rp)	Beban – LO (Rp)
1. Beban Pakai Habis dan Tak Habis Pakai	49.307.968.958,00	(11.037.701.503,33)	27.716.185.995,91	65.986.453.450,58
2. Beban Jasa	161.178.653.042,97	(38.606.909.960,88)	2.041.571.072,93	124.613.314.155,02
3. Beban Pemeliharaan	28.439.544.250,89	(20.831.140.599,26)	2.598.362.291,01	10.206.765.942,64
4. Beban Perjalanan Dinas	43.469.759.730,00	(700.000,00)	0,00	43.469.059.730,00
5. Beban Pengadaan Barang Lainnya	71.630.893.919,00	(176.842.331,00)	0,00	71.454.051.588,00
Jumlah	354.026.819.900,86	(70.653.294.394,47)	32.356.119.359,85	315.729.644.866,24

Rincian Beban Barang dan Jasa tahun 2023 berdasarkan pengelompokannya adalah sebagai berikut:

(1) Beban Pembayaran Pakai Habis dan Tak Habis Pakai

Beban Pakai Habis dan Tak Habis Pakai Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp65.986.453.450,58 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pakai Habis dan Tak Habis Pakai:	Pengeluaran (Rp)	Pembayaran utang, Reklasifikasi (Rp)	Pengakuan utang belanja, Reklasifikasi (Rp)	Beban – LO (Rp)
1. Beban Barang Pakai	49.307.968.958,00	(11.037.701.503,33)	27.664.122.752,44	65.934.390.207,11
2. Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	52.063.243,47	52.063.243,47
Jumlah	49.307.968.958,00	(11.037.701.503,33)	27.716.185.995,91	65.986.453.450,58

Beban Pakai Habis dan Tak Habis Pakai termasuk sebagai beban persediaan. Untuk barang persediaan, persediaan awal dan pembelian selama tahun berjalan, pengakuan utang, penerimaan hibah dan reklas dari aset tetap menjadi total barang tersedia untuk digunakan/didistribusikan. Persediaan akhir hasil *stock opname* selain menjadi sajian persediaan di neraca, juga sebagai acuan jurnal penyesuaian dalam menghitung beban persediaan. Rincian beban persediaan sebagai berikut:

Beban Persediaan:	Barang Pakai Habis	Barang Tak Habis Pakai	Total
1. Pengeluaran kas tahun 2023	49.307.968.958,00	0,00	49.307.968.958,00
2. Pembayaran utang belanja tahun 2023	(6.636.663.564,50)	0,00	(6.636.663.564,50)
3. Reklas dari belanja RSUD dan Puskesmas	11.442.028.218,00	0,00	11.442.028.218,00
4. Pengakuan utang belanja tahun 2023	8.355.885.145,44	0,00	8.355.885.145,44
5. Penerimaan hibah	7.026.308.289,00	0,00	7.026.308.289,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Beban Persediaan:	Barang Pakai Habis	Barang Tak Habis Pakai	Total
6. Reklasifikasi dari aset tetap	839.901.100,00	0,00	839.901.100,00
7. Reklasifikasi ke aset tetap	(3.320.000,00)	0,00	(3.320.000,00)
8. Kapitalisasi Aset Tetap	(1.101.671.550,00)	0,00	(1.101.671.550,00)
9. Reklas persediaan	(3.296.046.388,83)	52.063.243,47	(3.243.983.145,36)
Jumlah	65.934.390.207,11	52.063.243,47	65.986.453.450,58

(2) Beban Pembayaran Jasa

Beban pembayaran jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp124.613.314.155,02 disajikan sebagai berikut:

Beban Pembayaran Jasa:	Pengeluaran (Rp)	Pembayaran utang, Reklas dan kapitalisasi beban (Rp)	Pengakuan utang dan Reklas (Rp)	Beban – LO (Rp)
1. Beban Jasa Kantor	87.620.894.721,00	(3.725.602.038,52)	1.836.969.779,38	85.732.262.461,86
2. Beban Iuran Jaminan/Asuransi	12.964.788.465,00	0,00	0,00	12.964.788.465,00
3. Beban Sewa Tanah	73.200.000,00	0,00	0,00	73.200.000,00
4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin	13.603.543.443,00	(52.110.756,47)	84.808.587,19	13.636.241.273,72
5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan	342.000.000,00	0,00	0,00	342.000.000,00
6. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	86.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00
7. Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	32.732.334.279,48	(30.926.396.200,48)	0,00	1.805.938.079,00
9. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.687.175.759,00	(3.014.295.105,00)	0,00	3.672.880.654,00
10. Beban Jasa Ketersediaan Layanan	104.100.500,00	0,00	0,00	104.100.500,00
11. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
12. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.916.615.875,49	(888.505.860,41)	119.792.706,36	6.147.902.721,44
Jumlah	161.178.653.042,97	(38.606.909.960,88)	2.041.571.072,93	124.613.314.155,02

(3) Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp10.206.765.942,64 dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Beban Pemeliharaan:	Pengeluaran (Rp)	Pembayaran utang, Reklasifikasi, Kapitalisasi (Rp)	Pengakuan utang belanja, Reklasifikasi (Rp)	Beban – LO (Rp)
1. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.484.564.920,00	(86.515.437,00)		4.398.049.483,00
2. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.998.508.298,02	(9.328.023.436,29)	2.129.231.597,91	5.799.716.459,64
3. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.956.471.032,87	(11.416.601.725,97)	469.130.693,10	9.000.000,00
Jumlah	28.439.544.250,89	(20.831.140.599,26)	2.598.362.291,01	10.206.765.942,64

(4) Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp43.469.059.730,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas:	Pengeluaran (Rp)	Pembayaran utang, Reklas dan kapitalisasi beban (Rp)	Pengakuan utang dan Reklas (Rp)	Beban – LO (Rp)
1. Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.445.914.747,00	(700.000,00)	0,00	17.445.214.747,00
2. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.552.304.983,00	0,00	0,00	23.552.304.983,00
3. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.293.000.000,00	0,00	0,00	1.293.000.000,00
4. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.178.540.000,00	0,00	0,00	1.178.540.000,00
Jumlah	43.469.759.730,00	(700.000,00)	0,00	43.469.059.730,00

(5) Beban Barang Lainnya

Beban barang lainnya Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp71.454.051.588,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban barang lainnya:	Pengeluaran (Rp)	Pembayaran utang, reklasifikasi (Rp)	Pengakuan utang dan reklasifikasi (Rp)	Beban – LO (Rp)
1. Beban Makanan dan Minuman	19.393.294.430,00	(1.350.000,00)	0,00	19.391.944.430,00
2. Beban Pakaian Kerja	2.128.260.670,00	0,00	0,00	2.128.260.670,00
3. Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.365.501.013,00	0,00	0,00	8.365.501.013,00
5. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.266.438.500,00	0,00	0,00	2.266.438.500,00
6. Beban Barang dan Jasa BOS	39.477.399.306,00	(175.492.331,00)	0,00	39.301.906.975,00
7. Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	71.630.893.919,00	(176.842.331,00)	0,00	71.454.051.588,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

c) Beban Bunga

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak memiliki beban bunga.

d) Beban Hibah

Dalam pelaksanaan pemerintahan tahun 2023 beban hibah disajikan di dalam LO sebesar Rp58.706.729.272,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Hibah:	Jumlah (Rp)
1. Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	16.396.924.800,00
2. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.132.584.800,00
3. Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	0,00
4. Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
5. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.884.414.057,00
6. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
7. Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
8. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.168.580.000,00
9. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00
10. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.311.500.000,00
11. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.472.400.000,00
12. Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00
13. Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	455.010.000,00
14. Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	931.213.800,00
15. Beban Hibah Gedung dan Bangunan ke Kejaksaan Negeri Way Kanan	649.250.086,00
16. Beban Hibah Gedung dan Bangunan ke Kepolisian Resor Way Kanan	1.076.797.599,00
17. Beban Hibah Gedung dan Bangunan ke Pure Padme Sana Kec Banjit	208.269.204,00
18. Beban Hibah Peralatan dan Mesin ke Datasemen Polisi Militer (Denpom)	195.900.000,00
19. Beban Hibah ke Pemerintah Kampung	700.881.582,00
20. Beban Hibah ke Swasta	10.823.003.344,00
Jumlah	58.706.729.272,00

e) Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp105.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Beban Bantuan Sosial:	Jumlah (Rp)
1. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00
2. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	105.000.000,00
Jumlah	105.000.000,00

2) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp576.606.738,85 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang:	Jumlah (Rp)
1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	199.746.880,05
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	5.911.222,90
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	721.080,00
4. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	21.038.546,34
5. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	349.189.009,56
6. Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00
7. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00
Jumlah	576.606.738,85

3) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi beban penyusutan dan amortisasi menggambarkan besaran nilai konsumsi aset atau sebagai alokasi sistimatis penurunan nilai aset selama setahun karena digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Beban penyusutan aset dan amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Pada periode pelaporan yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp193.909.530.539,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi:	Jumlah (Rp)
1. Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.717.245.373,00
2. Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.225.629.156,00
3. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.966.156.006,00
4. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	500.004,00
5. Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00
Jumlah	193.909.530.539,00

4) Beban Transfer

Beban transfer yang disajikan pada LO Tahun 2023 sebesar Rp90.285.711.934,26 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Beban Transfer:	Pengeluaran (Rp)	Pembayaran utang dan Aktifitas Transitoris (Rp)	Pengakuan utang belanja (Rp)	Beban – LO (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.319.999.850,00	0,00	0,00	1.319.999.850,00
2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	972.184.764,26	0,00	0,00	972.184.764,26
4. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	287.770.148.500,00	(220.151.341.740,00)	20.374.720.560,00	87.993.527.320,00
Jumlah	290.062.333.114,26	(220.151.341.740,00)	20.374.720.560,00	90.285.711.934,26

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional defisit sebesar Rp33.858.257.219,42 yang merupakan selisih antara pendapatan operasional dengan beban operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Surplus/defisit kegiatan operasional:	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan Operasional	1.165.333.815.030,93
2. Beban Operasional	1.199.192.072.250,35
Jumlah	(33.858.257.219,42)

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp3.472.992.826,38 dengan rincian sebagai berikut:

Surplus/defisit kegiatan non operasional:	Jumlah (Rp)
1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	4.075.911.157,79
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	602.918.331,41
Jumlah	3.472.992.826,38

Surplus dari kegiatan non operasional adalah sebagai berikut:

Surplus dari Kegiatan Non Operasional:	Jumlah (Rp)
1. Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	507.026.441,00
2. Surplus Penerimaan Piutang yang Telah Disisihkan	422.889.902,81
3. Surplus Bagian Laba dari Penyertaan Modal PT BPRS	3.145.994.813,98
Jumlah	4.075.911.157,79

Defisit dari kegiatan non operasional adalah sebagai berikut:

Surplus dari Kegiatan Non Operasional:	Jumlah (Rp)
1. Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO (Ekstrakomptabel)	548.149.671,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Surplus dari Kegiatan Non Operasional:	Jumlah (Rp)
2. Defisit Bagian Laba dari Penyertaan Modal PT Way Kanan Makmur	54.768.660,41
Jumlah	602.918.331,41

e. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa adalah untuk menyajikan Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa di Laporan Operasional. Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak memiliki pendapatan luar biasa. Sedangkan beban luar biasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp257.796.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Operasional dan Jasa Pembongkaran dan Pengeluaran Barang Hibah dari Pelabuhan Tannjung Priok.	106.775.000,00
2. Biaya Penanganan Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.	78.021.125,00
3. Biaya Perbaikan Rumah dan Bangunan Akibat Musibah Kebakaran di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.	38.500.000,00
4. Biaya Perbaikan Atap Rumah, Atap Tribun Lapangan dan Akibat Musibah Angin Puting Beliung dan Angin Kencang di Kabupaten Way Kanan	34.500.000,00
Jumlah	257.796.125,00

f. Surplus/(Defisit) - LO

Surplus/(Defisit)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp-30.643.060.518,04 dengan rincian sebagai berikut:

Surplus/(Defisit) - LO:	Jumlah (Rp)
1. Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Operasional	(33.858.257.219,42)
2. Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	3.472.992.826,38
3. Pos Luar Biasa	(257.796.125,00)
Jumlah	(30.643.060.518,04)

6.3 Penjelasan Pos-Pos pada Neraca

Berkaitan dengan pos-pos yang terdapat dalam Neraca per 31 Desember 2023 meliputi posisi aset dan posisi kewajiban serta ekuitas, sesuai dengan formula akuntansi dimana jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas, dengan uraian sebagai berikut:

Neraca :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Aset	2.535.680.061.352,16	2.567.493.482.066,36
Jumlah Aset	2.535.680.061.352,16	2.567.493.482.066,36
2. Kewajiban	52.966.368.913,09	50.731.875.922,02
3. Ekuitas	2.482.713.692.439,07	2.516.761.606.144,34
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.535.680.061.352,16	2.567.493.482.066,36

Data diatas menunjukkan jumlah aktiva per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.535.680.061.352,16. Selanjutnya dari sisi pasiva jumlah kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.966.368.913,09 dan ekuitas sebesar Rp2.482.713.692.439,07. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

a. Aset

Pos Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam neraca yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya per 31 Desember 2023 bertambah sebesar Rp-31.813.420.714,20 sehingga menjadi Rp2.535.680.061.352,16 dengan rincian sebagai berikut:

Aset :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Aset Lancar	120.186.587.510,91	106.175.904.366,22
2. Investasi Jangka Panjang	40.722.200.975,21	36.514.649.370,64
3. Aset Tetap	1.989.806.331.975,54	2.027.039.676.127,00
4. Aset Lainnya	384.964.940.890,50	397.763.252.202,50
Jumlah	2.535.680.061.352,16	2.567.493.482.066,36

Aset per 31 Desember 2023 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aset Lancar

Aset Lancar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp120.186.587.510,91 dengan rincian di bawah ini:

Aset :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Kas di Kas Daerah	16.145.374.260,67	31.764.845.208,58
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	96.400.000,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	3.891.934,00	6.206.101,00
4. Kas di BLUD	2.637.047.203,95	4.581.448.812,95
5. Kas Dana BOS	16.798.271,00	1.042.510.024,00
6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	4.421.438,00
7. Kas Dana BOK Puskesmas	2.869.421.437,00	0,00
8. Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
9. Piutang Pajak	1.732.358.023,27	2.076.560.887,23
10. Piutang Retribusi	214.138.300,98	364.656.020,98
11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	269.272.750,00	1.910.345.276,32
12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.207.709.265,00	2.355.103.578,00
13. Piutang Transfer Antar Daerah	69.837.801.910,00	44.179.905.122,00
14. Piutang Lainnya	0,00	0,00
15. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	40.025.000,00	40.025.000,00
16. Penyisihan Piutang	(1.518.883.972,07)	(2.132.118.843,39)
17. Beban Dibayar Dimuka	52.110.756,47	84.808.587,19
18. Persediaan	23.679.522.370,64	19.800.787.153,36
Jumlah	120.186.587.510,91	106.175.904.366,22

Dari penjelasan diatas, rincian aset lancar dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

a) Kas di Kas Daerah

Pos kas di kas daerah meliputi uang kas yang ada di BUD selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. RKUD Bank Lampung	1.583.822.828,40	18.390.842.736,17
2. RKUD Bank BRI	14.561.551.432,27	13.374.002.472,41
Jumlah	16.145.374.260,67	31.764.845.208,58

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.145.374.260,67, nilai tersebut keseluruhannya merupakan saldo atas Sisa penggunaan dana DAK dan DAU per 31 Desember 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Keterangan	Jumlah (Rp)
1. DAK Non Fisik	
Dana Tunjangan Khusus Guru	82.912.800,00
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	2.040.293.300,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	213.769.407,00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	391.924.768,00
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	290.457.850,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	79.782.260,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	4.418.954,00
Dana KPP/Pertanian dan Pangan	29.609.000,00
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	31.731.500,00
2. DAK Fisik	
DAK Reguler Jalan	1.809.303.106,00
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	184.242.888,00
DAK Reguler Bidang Pendidikan	1.303.152.606,10
3 DAU	
Bidang Pendidikan	1.486.114.837,00
Bidang Kesehatan	499.153.569,00
Bidang Pekerjaan Umum	780.069.934,00
DBH Sawit	6.918.437.481,57
Jumlah	16.145.374.260,67

Terdapat pendapatan atas pengembalian temuan BPK pada Pemeriksaan atas LKPD TA 2022 yaitu pengembalian atas temuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN dan SMPN yang telah disetor ke kasda di Tahun 2023 sebesar Rp1.393.688.339,90, namun belum disetorkan kembali ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember Tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa atas pengembalian temuan Dana BOS TA 2023 sebesar Rp1.393.688.339,90 tersebut, digunakan untuk pelaksanaan belanja daerah di Tahun 2023. Saldo kas di kas daerah disajikan secara rinci pada Lampiran 1.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa uang yang masih berada di bendahara



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah/Kas Negara dan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Saldo kas di bendahara pengeluaran per OPD disajikan secara rinci pada Lampiran 2.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.891.934,00, kas ini merupakan penerimaan dari Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah.

d) Kas di BLUD

BLUD di lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah RSUD Zainal Abidin Pagar Alam dan 20 Puskesmas. Saldo kas di bendahara BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.637.047.203,95 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di BLUD :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Kas di Bendahara RSUD ZA Pagar Alam	1.920.646.105,00	3.391.062.678,00
2. Kas di Bendahara Puskesmas Banjit	4.018.483,00	14.674.732,00
3. Kas di Bendahara Puskesmas Baradatu	2.192.736,00	2.422.617,00
4. Kas di Bendahara Puskesmas Blambangan Umpu	206.453,00	5.397.575,00
5. Kas di Bendahara Puskesmas Bumi Agung	67.594.009,00	78.970.709,00
6. Kas di Bendahara Puskesmas Bumi Baru	15.723.613,00	54.759.922,00
7. Kas di Bendahara Puskesmas Gisting Jaya	31.577.625,00	51.328.392,00
8. Kas di Bendahara Puskesmas Gunung Labuhan	246.283.571,95	617.103.037,95
9. Kas di Bendahara Puskesmas Kasui	56.178.718,20	18.633.340,20
10. Kas di Bendahara Puskesmas Mesir Ilir	84.405.324,70	23.810.443,70
11. Kas di Bendahara Puskesmas Negeri Agung	34.295.064,50	16.708.401,50
12. Kas di Bendahara Puskesmas Negeri Baru	11.433.606,00	78.039.875,00
13. Kas di Bendahara Puskesmas Negeri Besar	17.842.058,00	9.005.055,00
14. Kas di Bendahara Puskesmas Pakuan Ratu	1.496.294,00	8.177.690,00
15. Kas di Bendahara Puskesmas Pisang Baru	9.909.091,00	8.551.343,00
16. Kas di Bendahara Puskesmas Purwa Agung	8.627.875,00	93.808.561,00
17. Kas di Bendahara Puskesmas Rebang Tangkas	3.092.657,60	3.663.092,60
18. Kas di Bendahara Puskesmas Serupa Indah	2.751.351,00	1.431.743,00
19. Kas di Bendahara Puskesmas Suka Bumi	31.810.772,00	37.793.862,00
20. Kas di Bendahara Puskesmas Way Tuba	86.542.877,00	66.105.743,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Kas di BLUD :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
21. Kas di Bendahara Puskesmas Tanjung Rejo	418.919,00	0,00
Jumlah	2.637.047.203,95	4.581.448.812,95

Laporan Auditor Independen BLUD RSUD ZA Pagar Alam pada saat laporan ini disusun masih diproses di Kantor Akuntan Publik (KAP).

e) Kas di Bendahara BOS

Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke kepada masing-masing satuan Pendidikan. Saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.798.271,00 dengan rincian sebagai berikut

Kas di Bendahara BOS:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Kas di bendahara BOS	16.798.271,00	12.632.780,00
2. Utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	1.029.877.244,00
Jumlah	16.798.271,00	1.042.510.024,00

Rincian per sekolah kas sebesar Rp16.798.271,00 secara rinci pada Lampiran 3 dan Lampiran 22.

f) Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Pada tahun 2023 sudah tidak ada Puskesmas di Kabupaten Way Kanan yang berbentuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

g) Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo kas dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

Kas Dana BOK :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Kas Dana BOK Puskesmas Banjit	126.297.950,00	0,00
2. Kas Dana BOK Puskesmas Baradatu	248.258.365,00	0,00
3. Kas Dana BOK Puskesmas Blambangan Umpu	65.310.569,00	0,00
4. Kas Dana BOK Puskesmas Bumi Agung	136.269.036,00	0,00
5. Kas Dana BOK Puskesmas Bumi Baru	181.177.274,00	0,00
6. Kas Dana BOK Puskesmas Gisting Jaya	94.183.161,00	0,00
7. Kas Dana BOK Puskesmas Gunung Labuhan	86.133.645,00	0,00
8. Kas Dana BOK Puskesmas Kasui	386.845.321,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Kas Dana BOK :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
9. Kas Dana BOK Puskesmas Mesir Ilir	105.524.528,00	0,00
10. Kas Dana BOK Puskesmas Negeri Agung	97.469.998,00	0,00
11. Kas Dana BOK Puskesmas Negeri Baru	280.909.920,00	0,00
12. Kas Dana BOK Puskesmas Negeri Besar	192.130.337,00	0,00
13. Kas Dana BOK Puskesmas Pakuan Ratu	35.142.340,00	0,00
14. Kas Dana BOK Puskesmas Pisang Baru	38.850.710,00	0,00
15. Kas Dana BOK Puskesmas Purwa Agung	36.779.667,00	0,00
16. Kas Dana BOK Puskesmas Rebang Tangkas	270.158.290,00	0,00
17. Kas Dana BOK Puskesmas Serupa Indah	168.412.932,00	0,00
18. Kas Dana BOK Puskesmas Suka Bumi	9.322.000,00	0,00
19. Kas Dana BOK Puskesmas Way Tuba	248.357.284,00	0,00
20. Kas Dana BOK Puskesmas Tanjung Rejo	61.888.110,00	0,00
Jumlah	2.869.421.437,00	0,00

h) Investasi Jangka Pendek

Tidak terdapat saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2023. Hal tersebut disebabkan investasi jangka pendek yang dikelola berupa deposito berjangka kurang dari satu tahun dalam rangka manajemen kas telah dicairkan sebelum tanggal 31 Desember 2023.

i) Piutang Pajak

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Piutang Pajak :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Piutang Pajak Hotel	8.000,00	8.000,00
2. Piutang Pajak Restoran	9.459.000,00	9.459.000,00
3. Piutang Pajak Reklame	3.004.007,00	3.004.007,00
4. Piutang Pajak Penerangan Lampu Jalan	0,00	0,00
5. Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00
6. Piutang Pajak Air Tanah	774.992,00	2.064.058,00
7. Piutang BPHTB	0,00	0,00
8. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2	1.719.112.024,27	2.062.025.822,23
9. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00
Jumlah	1.732.358.023,27	2.076.560.887,23



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi piutang pajak disajikan secara rinci pada Lampiran 4.

j) Piutang Retribusi

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Piutang Retribusi:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	42.851.070,00
2. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	11.400.000,00
3. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	16.056.000,00	16.056.000,00
4. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	175.416.900,98	271.683.550,98
5. Piutang Retribusi Izin Gangguan	22.665.400,00	22.665.400,00
Jumlah	214.138.300,98	364.656.020,98

Mutasi piutang retribusi disajikan secara rinci pada Lampiran 5.

k) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Piutang Lain-lain PAD yang Sah :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Piutang BLUD RSUD	87.666.000,00	1.780.570.300,00
2. Piutang BLUD Puskesmas	89.050.000,00	36.342.300,00
3. Piutang Pendapatan Bunga	0,00	875.926,32
4. Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Operasional	92.556.750,00	92.556.750,00
Jumlah	269.272.750,00	1.910.345.276,32

Mutasi piutang lain-lain PAD yang sah disajikan secara rinci pada Lampiran 6.

l) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo piutang Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Piutang Transfer Pemerintah Pusat:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Piutang Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	1.224.773.437,00	193.758.268,00
2. Piutang Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	1.391.707.722,00	767.156.034,00
3. Piutang Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29	101.448.062,00	11.648.838,00
4. Piutang Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00
5. Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan - PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)	1.634.062,00	364.156.138,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Piutang Transfer Pemerintah Pusat:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
6. Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara (Landrent)	0,00	61.166.360,00
7. Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara (Royalty)	0,00	327.623.387,00
8. Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Bumi	0,00	371.222.902,00
9. Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi	599.194.097,00	0,00
10. Piutang DBH SDA Perikanan	0,00	258.371.651,00
11. Piutang DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	888.951.885,00	0,00
Jumlah	4.207.709.265,00	2.355.103.578,00

Mutasi piutang transfer pemerintah pusat disajikan secara rinci pada Lampiran 7.

m) Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Piutang Transfer Antar Daerah :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.727.509.182,00	12.983.210.822,00
2. Piutang Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.633.078.202,00	6.297.490.504,00
3. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.515.268.674,00	19.525.650.858,00
4. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	195.268.857,00	77.813.661,00
5. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	4.766.676.995,00	5.295.739.277,00
Jumlah	69.837.801.910,00	44.179.905.122,00

Mutasi piutang transfer antar daerah disajikan secara rinci pada Lampiran 8.

n) Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada piutang lainnya.

o) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2022 sebesar Rp40.025.000,00. Sampai dengan per 31 Desember 2023 tidak ada perubahan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Adapun rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Lampiran 9.

p) Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Penyisihan piutang :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Penyisihan Piutang Pajak	801.052.785,19	789.755.565,91
2. Penyisihan Piutang Retribusi	214.138.300,98	230.190.946,33
3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	93.440.330,00	101.645.692,63
4. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	21.038.546,34	749.602.112,90
5. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	349.189.009,56	220.899.525,62
6. Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
7. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	40.025.000,00	40.025.000,00
Jumlah	1.518.883.972,07	2.132.118.843,39

Rincian penyisihan piutang disajikan secara rinci pada Lampiran 10.

q) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Karena jumlah yang dibayarkan bukan termasuk pada beban periode berjalan, maka jumlah yang telah dibayarkan merupakan uang muka dan diakui sebagai aset lancar pada neraca. Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.110.756,47 merupakan pembayaran sewa kendaraan dinas pada Inspektorat Kabupaten Way Kanan sebesar Rp37.355.371,85 dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu sebesar Rp14.755.384,62.

r) Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 25.476.348.592,08. Saldo persediaan merupakan hasil penghitungan fisik pada akhir tahun 2023 pada seluruh OPD dengan berdasarkan hasil pemeriksaan *stock opname* tahun 2023.

Dari saldo persediaan per 31 Desember 2023 terdapat persediaan gabah sebesar Rp760.673.525,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, persediaan gabah tersebut disimpan di lumbung petani padi yang berada di Kecamatan Bumi Agung dan Kecamatan Bahuga.

Terdapat juga persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp2.386.855.523,47 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.354.893.523,47 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebesar Rp31.962.000,00.

Dalam total persediaan obat sebesar Rp18.499.251.544,64 terdapat persediaan obat yang sudah kadaluarsa dan rusak sebesar Rp960.610.737,48 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp630.805.344,00 dan pada Puskesmas sebesar Rp329.805.393,48. Obat tersebut masih tercatat pada persediaan karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum ada Surat Ketetapan penghapusannya.

Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat hibah blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) sejumlah 37.500 keping dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Dukcapil Provinsi Lampung



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

yang tidak dicatat pada persediaan karena tidak diketahui harga perolehannya secara wajar.

Pada Dinas Kesehatan di Gudang Farmasi terdapat bantuan vaksin covid sejumlah 5.122 dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang tidak dicatat pada persediaan karena tidak diketahui harga perolehannya secara wajar.

Saldo persediaan berdasarkan jenis dan OPD disajikan secara rinci pada Lampiran 11.

2) Investasi Jangka Panjang

Pos investasi jangka panjang merupakan pos untuk mencatat investasi jangka panjang yang meliputi investasi nonpermanen dan investasi permanen pemerintah daerah. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Investasi Non Permanen	92.170.000,00	92.170.000,00
2. Penyisihan Dana Bergulir	(92.170.000,00)	(92.170.000,00)
3. Investasi Permanen	40.722.200.975,21	36.514.649.370,64
Jumlah	40.722.200.975,21	36.514.649.370,64

a) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen merupakan pemberian dana bergulir kepada koperasi/KUD dan UKM di Kabupaten Way Kanan dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha melalui perkuatan struktur keuangan Koperasi/KUD dan UKM . Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak ada pengembalian atas saldo per 31 Desember 2014. Investasi nonpermanen disajikan secara rinci pada Lampiran 12.

b) Penyisihan Dana Bergulir

Penyisihan dana bergulir sebesar Rp92.170.000,000. Nilai ini merupakan nilai dari penentuan kualitas dana bergulir yaitu macet. Kualitas macet disisihkan sebesar 100% apabila dana bergulir belum dilunasi setelah masa jatuh tempo terlampaui dengan rentang waktu lebih dari lima tahun dari masa jatuh tempo berakhir.

c) Investasi Permanen

Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga memiliki investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pada beberapa BUMD. Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Penyertaan modal :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Penyertaan Modal Pada PT Bank Lampung	15.800.000.000,00	13.800.000.000,00
2. Penyertaan Modal Pada PT BPRS Way Kanan	24.256.214.708,31	21.993.894.443,33
3. BUMD PT Way Kanan Makmur	665.986.266,90	720.754.927,31



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Penyertaan modal :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Jumlah	40.722.200.975,21	36.514.649.370,64

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Way Kanan menambahkan penyertaan modal pada Bank Lampung sebesar Rp2.000.000.000,00 dan PT BPR Syariah Way Kanan sebesar Rp800.000.000,00.

Pencatatan penyertaan Modal pada Bank Lampung menggunakan metode biaya, saldo awal penyertaan modal PT Bank Lampung sebesar Rp13.800.000.000,00 penambahan TA 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga saldo akhir penyertaan modal pada PT Bank Lampung sejumlah Rp15.800.000.000,00.

Pencatatan penyertaan modal pada PT BPRS Way Kanan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2023 Kabupaten Way Kanan menambahkan penyertaan modal sebesar Rp800.000.000,00 dan penambahan dari pengakuan laba milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk tahun 2023 sebesar Rp3.145.994.813,98 serta dikurangi dari realisasi penerimaan deviden sebesar Rp 1.683.674.549,00 (sesuai dengan metode ekuitas) sehingga saldo akhir penyertaan modal pada PT BPR Syariah Way Kanan sebesar Rp24.256.214.708,31.

Pencatatan penyertaan modal pada PT Way Kanan Makmur menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2023 PT Way Kanan Makmur mengalami kerugian yang mengurangi penyertaan modal Kabupaten Way Kanan sebesar Rp 54.768.660,41. Laporan Auditor Independen PT Way Kanan Makmur pada saat laporan ini disusun masih diproses di Kantor Akuntan Publik (KAP).

Mutasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan disajikan secara rinci pada Lampiran 13.

3) Aset Tetap

Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp1.989.806.331.975,54 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Tanah	107.843.421.459,00	107.877.389.622,00
2. Peralatan dan Mesin	464.197.978.688,24	447.081.196.563,24
3. Gedung dan Bangunan	824.953.462.642,03	806.272.894.895,32
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.746.059.939.274,29	2.670.792.082.709,94
5. Aset Tetap Lainnya	80.815.860.643,83	69.535.590.775,00
6. Kontruksi dalam Pengerjaan	24.339.282.330,65	8.024.587.449,00
7. Akumulasi Penyusutan	(2.258.403.613.062,50)	(2.082.544.065.887,50)
Jumlah	1.989.806.331.975,54	2.027.039.676.127,00

Dalam hal penyajian data aset dalam neraca terdapat mutasi aset baik berupa penambahan maupun pengurangan aset. Penambahan/pengurangan aset diantaranya meliputi belanja modal, retensi, kapitalisasi aset, reklasifikasi dan penghapusan.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi aset tetap disajikan secara rinci pada Lampiran 14. Adapun penjelasan lebih rinci pada pos aset tetap satu persatu adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Saldo tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp107.843.421.459,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tanah :	31 Desember 2023
	Rp
1. Saldo 31 Desember 2022	107.877.389.622,00
2. Mutasi Tambah	70.683.000,00
3. Mutasi Kurang	(104.651.163,00)
Jumlah	107.843.421.459,00

Mutasi tambah dan kurang Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah dan Kurang Tanah :	31 Desember 2023
	Rp
1. Inventarisasi	70.683.000,00
2. Hibah ke Pemerintah Kampung	(4.651.163,00)
3. Koreksi	(100.000.000,00)
Jumlah	(33.968.163,00)

Terdapat tanah dikawasan perkantoran yang terdaftar di aset OPD Sekretariat Daerah yang dikuasai oleh masyarakat/pihak lain yang tidak memiliki izin tinggal dan penguasaan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang maupun Kepala Daerah seluas 99.976 m2 dengan nilai sebesar Rp999.059.474,61 (99.976 m2 x Rp9.992,99).

b) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp464.197.978.688,24 dengan rincian sebagai berikut:

Peralatan dan mesin :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Alat Besar	18.129.503.715,00	18.132.455.590,00
2. Alat Angkutan	76.935.981.294,00	82.331.937.844,00
3. Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.843.167.138,00	3.855.795.538,00
4. Alat Pertanian	8.723.838.322,00	8.606.310.360,00
5. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	125.608.124.781,00	114.812.596.436,00
6. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	3.230.954.725,00	2.894.339.695,00
7. Alat Kedokteran Dan Kesehatan	98.608.753.462,74	97.172.968.637,74
8. Alat Laboratorium	41.605.531.648,00	38.399.630.921,00
9. Alat Persenjataan	803.299.200,00	529.147.200,00
10. Komputer	81.521.844.333,50	75.745.411.073,50
11. Alat Eksplorasi	749.000,00	749.000,00
12. Alat Pengeboran	2.700.000,00	2.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Peralatan dan mesin :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
13. Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.550.000,00	1.550.000,00
14. Alat Bantu Eksplorasi	6.200.000,00	5.800.000,00
15. Alat Keselamatan Kerja	1.086.385.081,00	643.845.730,00
16. Alat Peraga	92.330.000,00	92.330.000,00
17. Peralatan Proses/Produksi	47.717.450,00	44.450.000,00
18. Rambu - Rambu	3.284.732.013,00	3.267.167.013,00
19. Peralatan Olah Raga	664.616.525,00	542.011.525,00
Jumlah	464.197.978.688,24	447.081.196.563,24

Uraian mutasi tambah dan kurang peralatan dan mesin sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin :	31 Desember 2023
	Rp
1. Saldo 31 Desember 2022	447.081.196.563,24
2. Mutasi Tambah	33.989.282.837,00
3. Mutasi Kurang	(16.872.500.712,00)
Jumlah	464.197.978.688,24

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin :	31 Desember 2023
	Rp
1. Belanja Modal TA 2023	31.144.997.407,00
2. Belanja BLUD RSUD	56.195.000,00
3. Belanja BLUD Puskesmas	530.932.500,00
4. Reklas dari Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	3.320.000,00
5. Reklas antar aset tetap	472.800.330,00
6. Reklasifikasi dari Aset lain-lain	168.000.000,00
7. Hibah dari Kementerian Dalam Negeri	14.062.050,00
8. Pengakuan utang retensi	898.450,00
9. Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	1.538.412.380,00
10. Reklas dari Aset Tetap Lainnya	59.664.720,00
Jumlah	33.989.282.837,00

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin :	31 Desember 2023
	Rp
1. Hibah ke Instansi Vertikal	195.900.000,00
2. Aset Ekstrakomptabel	547.559.471,00
3. Reklasifikasi ke barang pakai habis	709.023.700,00
4. Lelang kendaraan	3.974.392.500,00
5. Penghapusan BMD	1.250.000,00
6. Reklasifikasi ke Aset lain-lain	7.850.176.272,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin :	31 Desember 2023
	Rp
7. Reklasifikasi belanja BOS	3.567.952.788,00
8. Pembayaran utang retensi	26.245.981,00
Jumlah	16.872.500.712,00

c) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp824.953.462.642,03 dengan rincian sebagai berikut:

Gedung dan bangunan :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Bangunan Gedung	811.272.503.267,03	792.690.059.520,32
2. Monumen	3.688.078.820,00	3.651.755.820,00
3. Bangunan Menara	244.421.000,00	257.753.000,00
4. Tugu Titik Kontrol/Pasti	9.748.459.555,00	9.673.326.555,00
Jumlah	824.953.462.642,03	806.272.894.895,32

Uraian mutasi tambah dan kurang gedung dan bangunan sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan :	31 Desember 2023
	Rp
1. Saldo 31 Desember 2022	806.272.894.895,32
2. Mutasi Tambah	31.841.442.559,23
3. Mutasi Kurang	(13.160.874.812,52)
Jumlah	824.953.462.642,03

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan :	31 Desember 2023
	Rp
1. Belanja Modal TA 2023	18.301.118.891,52
2. Belanja BLUD RSUD	34.373.000,00
3. Belanja BLUD Puskesmas	17.910.000,00
4. Reklas dari Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	21.968.500,00
5. Belanja BOS	76.777.160,00
6. Pengakuan utang retensi	960.117.307,44
7. Reklasifikasi dari Aset lain-lain	1.510.027.596,00
8. Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	10.919.150.104,27
Jumlah	31.841.442.559,23

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan :	31 Desember 2023
	Rp
1. Hibah ke Pemerintah Kampung	991.214.446,00
2. Hibah ke Swasta	1.442.569.501,00
3. Pembayaran utang retensi	58.899.359,52
4. Penghapusan BMD	6.918.671.712,00
5. Reklasifikasi ke Aset lain-lain (Rusak Berat)	2.919.969.817,00
6. Reklas antar aset tetap	829.549.977,00
Jumlah	13.160.874.812,52

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.746.059.939.274,29 dengan rincian sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Jalan dan Jembatan	2.043.002.441.081,29	1.973.698.092.860,94
2. Bangunan Air	593.713.156.594,00	587.883.321.219,00
3. Intalasi	43.726.001.569,00	43.091.001.050,00
4. Jaringan	65.618.340.030,00	66.119.667.580,00
Jumlah	2.746.059.939.274,29	2.670.792.082.709,94

Uraian mutasi tambah dan kurang jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan :	31 Desember 2023
	Rp
1. Saldo 31 Desember 2022	2.670.792.082.709,94
2. Mutasi Tambah	77.663.826.195,28
3. Mutasi Kurang	(2.395.969.630,93)
Jumlah	2.746.059.939.274,29

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan :	31 Desember 2023
	Rp
1. Belanja Modal TA 2023	57.105.656.092,02
2. Pengakuan utang retensi	2.908.288.785,46
3. Reklas dari KDP	1.459.329.500,00
4. Belanja BOS	30.177.650,00
5. Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	15.801.074.520,80
6. Reklas antar aset tetap	359.299.647,00
Jumlah	77.663.826.195,28



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan :	31 Desember 2023
	Rp
1. Pembayaran utang retensi	1.845.619.080,93
2. Reklasifikasi ke Aset lain-lain	547.800.550,00
3. Reklas antar aset tetap	2.550.000,00
Jumlah	2.395.969.630,93

e) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp80.815.860.643,83 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Bahan Perpustakaan	78.289.619.350,83	67.128.269.195,00
2. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	2.371.985.280,00	2.304.534.180,00
3. Hewan		0,00
4. Biota Perairan		0,00
5. Tanaman	64.553.200,00	65.783.200,00
6. Barang Koleksi Non Budaya	84.452.813,00	34.504.200,00
7. Aset Tetap Dalam Renovasi	5.250.000,00	2.500.000,00
Jumlah	80.815.860.643,83	69.535.590.775,00

Uraian mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya :	31 Desember 2023
	Rp
1. Saldo 31 Desember 2022	69.535.590.775,00
2. Mutasi Tambah	12.458.508.458,83
3. Mutasi Kurang	(1.178.238.590,00)
Jumlah	80.815.860.643,83

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya :	31 Desember 2023
	Rp
1. Belanja Modal TA 2023	522.297.125,00
2. Belanja BOS	3.460.997.978,00
3. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa BOS	175.492.331,00
4. Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	8.299.721.024,83
Jumlah	12.458.508.458,83



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya :	31 Desember 2023
	Rp
1. Aset Ekstrakomptabel	590.200,00
2. Reklasifikasi ke barang pakai habis	130.877.400,00
3. Reklasifikasi ke Aset lain-lain	168.324.050,00
4. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	59.664.720,00
5. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	818.782.220,00
Jumlah	1.178.238.590,00

f) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.339.282.330,65 dengan rincian sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan :	31 Desember 2023
	Rp
1. Saldo 31 Desember 2022	8.024.587.449,00
2. Mutasi Tambah	17.774.024.381,65
3. Mutasi Kurang	(1.459.329.500,00)
Jumlah	24.339.282.330,65

Mutasi tambah dan kurang KDP per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah dan Kurang KDP :	31 Desember 2023
	Rp
1. Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	17.774.024.381,65
2. Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.459.329.500,00)
Jumlah	16.314.694.881,65

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan secara rinci pada Lampiran 15.

g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.258.403.613.062,50 sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap :	31 Desember 2022
	Rp
1. Saldo 31 Desember 2022	2.082.544.065.887,50
2. Mutasi Tambah	193.909.530.539,00
3. Mutasi Kurang	(18.049.983.364,00)
Jumlah	2.258.403.613.062,50



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap :	31 Desember 2023
	Rp
1. Penyusutan Peralatan dan Mesin 2023	38.717.245.373,00
2. Penyusutan Gedung dan Bangunan 2023	16.225.629.156,00
3. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 2023	138.966.156.006,00
4. Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2023	500.004,00
5. Hibah Gedung dan Bangunan	(314.548.134,00)
6. Reklas ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	(11.317.946.639,00)
7. Lelang kendaraan	(3.974.392.500,00)
8. Penghapusan BMD	(6.919.921.712,00)
9. Koreksi Peralatan dan Mesin 2022	(297.753.319,00)
10. Koreksi Gedung dan Bangunan 2022	4.392.520.773,00
11. Koreksi Jalan, Jaringan dan Irigasi 2022	382.058.165,00
12. Koreksi Aset Tetap Lainnya	2,00
Jumlah	175.859.547.175,00

4) Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp384.964.940.890,50 dengan rincian sebagai berikut:

Aset lainnya:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Aset Tak Berwujud	2.495.334.720,00	1.783.442.500,00
2. Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	(30.000.000,00)
Aset Tak Berwujud Netto	2.495.334.720,00	1.753.442.500,00
3. Aset Lain-lain	382.469.606.170,50	396.009.809.702,50
Jumlah	384.964.940.890,50	397.763.252.202,50

Uraian mutasi tambah dan kurang aset tak berwujud sebagai berikut :

Aset Tak Berwujud :	31 Desember 2023
	Rp
1. Saldo 31 Desember 2022	1.783.442.500,00
2. Penghapusan	(106.890.000,00)
3. Reklas dari Aset Tetap Lainnya	818.782.220,00
Jumlah	2.495.334.720,00

Uraian mutasi tambah dan kurang aset lain-lain sebagai berikut :

Aset lain-lain :	31 Desember 2023
	Rp
1. Treasury Deposit Facility (TDF)	396.009.809.702,50
2. Hibah ke Instansi Vertikal	11.486.270.689,00
3. Hibah ke Swasta	(3.611.614.421,00)
4. Penghapusan BMD	(1.934.316.889,00)



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Aset lain-lain :	31 Desember 2023
	Rp
5. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(9.399.997.950,00)
6. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	(2.351.264.905,00)
7. Koreksi - bahasanya cari yang bagus	(1.510.027.596,00)
8. Lelang Kendaraan	(168.000.000,00)
9. Treasury Deposit Facility (TDF)	(269.000.000,00)
10. Hibah ke Instansi Vertikal	(5.782.252.460,00)
Jumlah	382.469.606.170,50

Aset tak berwujud dan aset lain-lain disajikan secara rinci pada Lampiran 16 dan Lampiran 17.

b. Kewajiban

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp52.966.368.913,09 dan terjadi peningkatan sebesar 4,40% bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.731.875.922,02 dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban :	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Kewajiban Jangka Pendek	52.966.368.913,09	50.731.875.922,02
2. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	52.966.368.913,09	50.731.875.922,02

Kewajiban per 31 Desember 2023 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	27.630.263,00	1.060.000.114,00
2. Utang Bunga	0,00	0,00
3. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
4. Pendapatan Diterima di Muka	5.000.000,00	5.000.000,00
5. Utang Belanja	52.933.738.650,09	49.666.875.808,02
6. Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	52.966.368.913,09	50.731.875.922,02

Dari penjelasan diatas, rincian kewajiban jangka pendek dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah pungutan untuk diteruskan kepada pihak lain di luar entitas Pemerintah Daerah. Rincian utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan pemungutnya dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Utang PFK:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
1. Dipungut oleh BUD	13.508.981,00	0,00
2. Dipungut oleh OPD	0,00	0,00
3. Dipungut oleh BLUD RSUD ZA Pagar Alam	0,00	23.114.005,00
4. Dipungut oleh BLUD Puskesmas	14.121.282,00	7.008.865,00
5. Dipungut oleh FKTP	0,00	0,00
6. Dipungut dari BOS	0,00	1.029.877.244,00
Jumlah	27.630.263,00	1.060.000.114,00

Utang PFK berdasarkan pemungut dan jenis pungutannya disajikan secara rinci pada Lampiran 18.

b) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang sesungguhnya bukan merupakan hak pada tahun yang bersangkutan. Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.000.000,00 merupakan penyewaan properti/lokasi mesin ATM.

c) Utang Belanja

Saldo utang belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.933.738.650,09. Utang belanja adalah utang beban barang dan jasa yang berkaitan atas diterapkannya akuntansi basis akrual. Utang belanja disajikan secara rinci pada Lampiran 19 dan Lampiran 20.

d) Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2022 Kabupaten Way Kanan tidak mempunyai saldo utang jangka pendek lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.482.713.692.439,07 dan Rp2.516.791.606.144,34.

Ekuitas sebagaimana jumlah di atas adalah nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Way Kanan per tanggal neraca, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

6.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE ini menggambarkan posisi kekayaan bersih yang dimiliki oleh entitas pemerintah, berikut informasi rinci tentang ekuitas Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023:

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas:	2023
1. Ekuitas Awal	2.516.761.606.144,34
2. Surplus/(Defisit) LO	(30.643.060.518,04)
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(3.404.853.187,23)



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas:

4. Ekuitas Akhir

2023
2.482.713.692.439,07

a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 Rp2.516.761.606.144,34 adalah saldo akhir ekuitas pada neraca 31 Desember 2022.

b. Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit LO sebesar Rp-30.643.060.518,04 adalah hasil dari Laporan Operasional tahun 2023.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.437.190.687,23 dengan rincian sebagai berikut:

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2023
1. Koreksi Penyusutan Peralatan dan Mesin - Ke aset lain-lain (Rusak Berat)	7.850.176.272,00
2. Koreksi Penyusutan Gedung dan Bangunan - Ke aset lain-lain (Rusak Berat)	2.919.969.817,00
3. Koreksi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Ke aset lain-lain (Rusak Berat)	547.800.550,00
4. Inventarisasi aset tetap tanah	(29.317.000,00)
5. Koreksi aset lain-lain	(269.000.000,00)
6. Koreksi Piutang DBH Sesuai dengan PMK 90 th 2023 - Penetapan KB dan LB DBH pada tahun 2023	(2.355.103.578,00)
7. Koreksi Penyisihan piutang sesuai PMK 90 th 2023	749.602.112,90
8. Koreksi penyisihan piutang Pajak PBB	17.512.094,46
9. Koreksi Piutang PBB	(17.512.094,46)
10. Koreksi Utang Retensi PU	(255.025,13)
11. Penghapusan Aset Tak Berwujud Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	(76.890.000,00)
12. Penghapusan Aset Lain-Lain (Pemusnahan)	(2.351.264.905,00)
13. Lelang Kendaraan Dinas	(5.782.252.460,00)
14. Koreksi pencatatan persediaan (Penghapusan cetak capil)	(163.830.850,00)
15. Koreksi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2022	297.753.319,00
16. Koreksi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2022	(4.392.520.773,00)
17. Koreksi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 2022	(382.058.165,00)
18. Koreksi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2,00)
19. Piutang Pajak Parkir RSUD BLUD	32.500.000,00
20. Penyisihan Piutang Pajak Parkir RSUD BLUD	(162.500,00)
Jumlah	(3.404.853.187,23)

d. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp2.482.713.692.439,07 merupakan Saldo Akhir Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Way Kanan TA 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

6.5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Selain disajikan di LRA informasi tentang SiLPA/SiKPA diperjelas lagi dengan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). LPSAL menggambarkan jumlah saldo anggaran lebih tahun lalu, penggunaannya di tahun berjalan dan SiLPA/SiKPA akhir tahun serta koreksi kesalahan atas pencatatan tahun lalu yang berpengaruh terhadap SiLPA/SiKPA.

Dalam LPSAL tahun 2023 terdapat Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp37.205.327.520,53 ini adalah silpa tahun lalu yang sudah direalisasikan di TA 2023 sebagai penerimaan pembiayaan-penggunaan saldo anggaran lebih.

Silpa TA 2023 sejumlah Rp21.644.902.843,62 dan terdapat koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp769.496.050,00 yang merupakan selisih kas dengan catatan di BKU pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Saldo Anggaran Lebih Akhir yaitu Rp37.205.327.520,53.

6.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum daerah, oleh karena itu LAK mencakup transaksi kas dan setara kas yang mempunyai pengaruh langsung pada kas BUD. LAK disusun oleh entitas yang memiliki fungsi bendahara umum daerah dalam hal ini PPKD/BUD. Semua transaksi yang langsung oleh BUD baik pendapatan, belanja, penerimaan/pengeluaran pembiayaan, pemungutan dan penyeteroran kewajiban PFK disajikan di dalam LAK.

Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, secara rinci komponen arus kas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan penerimaan dan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui fungsi BUD untuk membiayai aktivitas operasional selama satu periode pelaporan.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.334.525.548.624,75 dan arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.239.310.023.677,12 sehingga diperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp95.215.524.947,63. Jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2022 sebesar Rp125.117.057.385,30 maka terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp-29.901.532.437,67 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi:	2023	2022
1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.334.525.548.624,75	1.314.466.858.859,44
2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	(1.239.310.023.677,12)	(1.189.349.801.474,14)
Jumlah	95.215.524.947,63	125.117.057.385,30

Arus kas masuk dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.334.525.548.624,75 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi:	2023	2022
1. Penerimaan Pajak Daerah	22.873.383.491,14	19.723.432.197,04
2. Penerimaan Retribusi Daerah	2.419.262.670,00	2.308.149.197,43
3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.379.146.380,59	5.013.842.240,52
4. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.274.733.203,02	48.715.287.147,45
5. Penerimaan Dana Bagi Hasil	35.166.171.271,00	44.446.903.677,00
6. Penerimaan Dana Alokasi Umum	645.990.677.310,00	615.022.986.000,00
7. Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	75.839.869.755,00	113.974.659.654,00
8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	207.618.590.625,00	195.615.681.586,00
9. Penerimaan Dana Insentif Daerah	17.959.153.000,00	0,00
10. Penerimaan Dana Desa	198.651.640.000,00	183.269.898.000,00
11. Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	74.316.224.248,00	86.003.786.950,00
12. Penerimaan Hibah	36.696.671,00	10.180.448,00
13. Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	0,00	362.051.762,00
Jumlah	1.334.525.548.624,75	1.314.466.858.859,44

Arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.239.310.023.677,12 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi:	2023	2022
1. Pembayaran Pegawai	538.314.118.862,00	534.333.209.655,00
2. Pembayaran Barang dan Jasa	365.468.848.118,86	356.598.836.918,54
3. Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4. Pembayaran Belanja Hibah	45.101.927.457,00	24.162.015.144,55
5. Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	105.000.000,00	1.065.500.000,00
6. Pembayaran Tak Terduga	290.062.333.114,26	271.671.871.060,05
7. Pembayaran Transfer	257.796.125,00	1.518.368.696,00
Jumlah	1.239.310.023.677,12	1.189.349.801.474,14

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp507.026.441,00 dan arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp-110.513.480.015,54 sehingga diperoleh arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp-110.006.453.574,54. Jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2022 sebesar Rp-110.134.279.254,92 maka terdapat kenaikan arus kas bersih sebesar Rp127.825.680,38 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi:	2023	2022
1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	507.026.441,00	1.481.868.759,00
2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	(110.513.480.015,54)	(111.616.148.013,92)
Jumlah	(110.006.453.574,54)	(110.134.279.254,92)



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi:	2023	2022
1. Penjualan atas Peralatan dan Mesin	507.026.441,00	1.481.868.759,00
2. Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah	507.026.441,00	1.481.868.759,00

Arus keluar kas dari aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi:	2023	2022
1. Perolehan Tanah	0,00	0,00
2. Perolehan Peralatan dan Mesin	31.144.997.407,00	55.318.050.599,00
3. Perolehan Gedung dan Bangunan	18.301.118.891,52	11.822.755.924,32
4. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.105.656.092,02	40.047.446.424,60
5. Perolehan Aset Tetap Lainnya	522.297.125,00	1.184.378.366,00
6. Perolehan Aset Lainnya	639.410.500,00	743.516.700,00
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.800.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah	110.513.480.015,54	111.616.148.013,92

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan:	2023	2022
1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode yang berakhir s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp-755.987.069,00 dengan rincian arus masuk kas sebesar Rp63.258.964.812,00 dan arus keluar kas sebesar Rp64.014.951.881,00 disajikan sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris:	2023	2022
1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	63.258.964.812,00	60.621.069.223,00
2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	(64.014.951.881,00)	(60.642.219.223,00)
Jumlah	(755.987.069,00)	(21.150.000,00)

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris dapat dirinci sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris:	2023	2022
1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	63.258.964.812,00	60.621.069.223,00
2. Koreksi Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Jumlah	63.258.964.812,00	60.621.069.223,00



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris dapat dirinci sebagai berikut:

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris:	2023	2022
1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	63.245.455.831,00	60.621.069.223,00
2. Koreksi Silpa Tahun Sebelumnya	769.496.050,00	21.150.000,00
Jumlah	64.014.951.881,00	60.642.219.223,00

Dari keempat aktivitas dalam arus kas yang meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 kenaikan kas sebesar Rp15.546.915.695,91 dengan rincian di bawah ini:

Kenaikan/(Penurunan) Kas:	2023	2022
1. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	95.215.524.947,63	125.117.057.385,30
2. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(110.006.453.574,54)	(110.134.279.254,92)
3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(755.987.069,00)	(21.150.000,00)
Jumlah	(15.546.915.695,91)	14.961.628.130,38

Saldo akhir kas adalah sebesar Rp21.658.411.824,62 dengan rincian di bawah ini:

Saldo Akhir Kas:	2023	2022
1. Kenaikan dan Penurunan Kas	(15.546.915.695,91)	14.961.628.130,38
2. Saldo Awal Kas	37.205.327.520,53	22.243.699.390,15
3. Saldo Akhir Kas (1 + 2)	21.658.411.824,62	37.205.327.520,53



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VII
INFORMASI NON KEUANGAN

7.1 Struktur Kepegawaian/Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kabupaten Way Kanan s.d. 31 Desember 2023 didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 4585 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.1
Jumlah Pegawai per 31 Desember 2023

GOLONGAN	ESELON				TENAGA FUNGSIONAL			Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya		
Golongan IV / e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV / d	0	1	0	0	1	0	0	0	2
Golongan IV / c	0	16	2	0	6	1	0	0	25
Golongan IV / b	0	16	32	0	424	9	2	2	485
Golongan IV / a	0	0	79	25	429	29	37	22	621
SUB JUMLAH	0	33	113	25	860	39	39	24	1133
Golongan III / d	0	0	50	137	532	123	157	74	1073
Golongan III / c	0	0	2	110	421	69	82	44	728
Golongan III / b	0	0	0	66	182	109	24	128	509
Golongan III / a	0	0	0	8	198	102	10	221	539
SUB JUMLAH	0	0	52	321	1333	403	273	467	2849
Golongan II / d	0	0	0	0	11	167	0	82	260
Golongan II / c	0	0	0	0	52	47	14	140	253
Golongan II / b	0	0	0	0	14	0	0	42	56
Golongan II / a	0	0	0	0	3	1	0	16	20
SUB JUMLAH	0	0	0	0	80	215	14	280	589
Golongan I / d	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Golongan I / c	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Golongan I / b	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Golongan I / a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	14	14
JUMLAH	0	33	165	346	2273	657	326	785	4585

7.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 40 orang, dengan 36 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Jumlah Anggota Terbanyak yaitu Fraksi Partai Demokrat sebanyak 11 orang, Fraksi PAN dan PKS sebanyak 6 orang, Fraksi Partai Golkar dan Hanura, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PKB masingmasing sebanyak 5 orang, Fraksi PPDIP dan Fraksi Partai Gerindra masingmasing sebanyak 4 orang.

Adapun produk keputusan dan peraturan daerah DPRD Kabupaten Way Kanan didominasi oleh Surat Keputusan Bupati yaitu sebanyak 236 buah, disusul Peraturan Bupati sebanyak 35 buah dan Peraturan Daerah sebanyak 4 buah, sehingga jumlah produk Hukum yang dihasilkan sebanyak 275 buah.

7.3 Kelahiran

Di tahun 2023 Jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebanyak 9.980 angka ini menurun dari tahun 2022 yaitu sebanyak 13.232. Penurunan juga terjadi pada jumlah kartu tanda penduduk (KTP) yang dikeluarkan, di mana pada tahun 2022 terdapat sebanyak 36.318 KTP yang dikeluarkan dan pada tahun 2023 hanya terdapat sebanyak 33.368 KTP yang dikeluarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

7.4 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP tahun 2023 merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah (RKPD). RKP tahun 2023 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2023, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Dengan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, serta mengacu pada Rancangan RKP Tahun 2023, dan program strategis nasional, serta memperhatikan Dampak Covid-19 maka pada Perencanaan Tahun 2023 akan berfokus pada pencegahan penyebaran covid-19, Penangan Kesehatan dan penanganan dampak ekonomi dan sosial maka RKPD Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 mengambil tema “Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia, Pemulihan Ekonomi, Reformasi Birokrasi, dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung Ketersediaan Infrastruktur” yang secara umum diarahkan kepada pemulihan perekonomian sebagai dampak Covid-19 dengan pemberdayaan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan dan peningkatan peran koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan potensi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, pertambangan dan energi yang di topang dengan pembangunan Infrastruktur dan pelayanan dasar terutama pelayanan dan akses kesehatan, pendidikan, kependudukan dan perizinan serta pembangunan sumber daya manusia dan melibatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kesemuanya itu bermuara pada peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat Kabupaten Way Kanan.

Dalam hal pemerintahan, arah kebijakan dititikberatkan pada penciptaan tata pemerintahan yang transparan, aspiratif, partisipatif, akuntabel, adil, demokratis (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh aparatur daerah yang profesional dan bebas KKN, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung good governance, juga diperlukan peningkatan kualitas masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial serta kehidupan beragama. Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas pemuda sebagai penerus pembangunan.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan diatas, kebijakan dalam peningkatan kapasitas sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat perhatian. Kebijakan pengembangan infrastruktur ini akan dapat memberikan manfaat ganda terhadap peningkatan investasi, penciptaan kegiatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Asumsi yang disepakati untuk dijadikan sebagai acuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Untuk asumsi dasar ekonomi makro, yaitu:
 - Pertumbuhan Ekonomi 3 – 4 %.
 - Tingkat inflasi 3 - 4 %.
2. Target pembangunan, yaitu :
 - Tingkat pengangguran terbuka 3,5 %.
 - Tingkat Kemiskinan 11,9 %.
 - Rasio Gini
3. Indikator pembangunan, yaitu :
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,39 poin.
 - Presentase Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar 58,51 %.

Selain pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Way Kanan juga menitikberatkan pada lima agenda utama pembangunan yaitu:

1. Peningkatan SDM yang Berkualitas;
2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro, dan Pariwisata.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung
6. Ekonomi dan Pelayanan Publik

7.5 Bencana Non Alam

Kebijakan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 di Tahun 2023 di bagi kedalam empat tahap kebijakan yaitu:

1. Tahap 1, Program Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 (RKPD 2023):
2. Tahap 2, Penguatan Fasilitas Kesehatan:
 - a. Peningkatan perilaku sehat dan social distancing;
 - b. Penyediaan vaksin Covid-19 dan percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terutama bagi lansia dan kelompok rentan;
 - c. Pemenuhan kapasitas laboratorium (reagen, alat test dan sarana lab);
 - d. Penanganan pasien (APD, alkes, sarana dan prasarana kesehatan).
3. Tahap 3, Melindungi Kelompok Rentan dan Dunia Usaha:
 - a. Perluasan bantuan sosial;
 - b. Program pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM;
 - c. penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), optimalisasi pasokan pangan melalui kawasan sentra produksi pangan atau food estate;

Tahap 1 s.d 2 saat ini tengah dilakukan dan perlu terus dilakukan hingga penanganan Covid-19 ini selesai. Tahap 3 merupakan tahap setelah proses penanganan wabag Covid-19 selesai. Mengingat dampak Covid-19 setara dengan bencana besar, sehingga dibutuhkan program pemulihan ekonomi skala besar dengan pemerintah sebagai pemain utamanya.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Strategi dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. Penguatan Sektor Kesehatan

Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans dan system informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium, serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan atau sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium, penanganan kesehatan lainnya

2. Penanganan dampak Ekonomi

Pengadaan bahan pangan untuk ketahanan pangan, pemberian insentif ekonomi, stimulus UMKM terdampak, Pelatihan Kerja & Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia terdampak, penanganan dampak ekonomi lainnya.

3. Perluasan Program Perlindungan Sosial

Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Bansos dan hibah individu/masyarakat terdampak atau memiliki resiko social seperti pekerja informal/harian, keluarga miskin.

4. Pembangunan Infrastruktur

Investasi infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata.

5. Pembangunan Sumberdaya Manusia

Program Peningkatan SDM Kartu Prakerja, Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Usia Dini.

7.6 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Dalam penyusunan laporan keuangan TA 2023 Kabupaten Way Kanan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rekening berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan-laporan operasional, dan beban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VIII
P E N U T U P

Dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan TA 2023, diharapkan para pihak pengguna baik internal maupun eksternal dapat memperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan APBD TA 2023. Secara umum pelaksanaann APBD Tahun 2023 dari sisi pendapatan dan belanja mengalami peningkatan dari TA 2022, sedangkan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh penjualan dan pemusnahan aset lain-lain yang rusak berat, fasilitas pemerintahan maupun fasilitas umum yang berupa sarana dan prasarana semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, pelayanan kepada masyarakat juga terus ditingkatkan pada sisi yang lain. Harapan kami dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2023, selain memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, juga dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam penyusunan program yang akan datang.



BUPATI WAY KANAN

RADEN ADIPATI SURYA, S.H., M.M.